



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

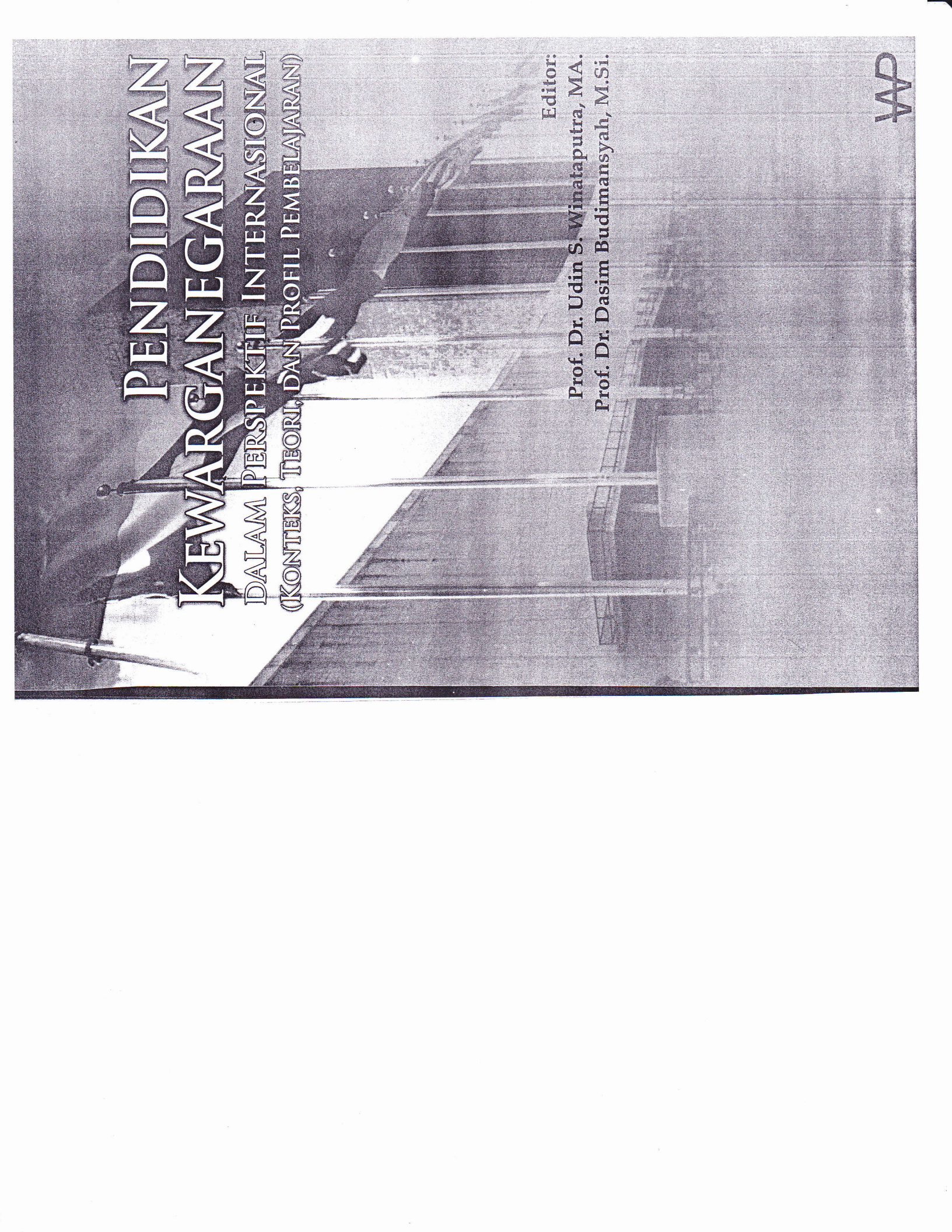
DALAM PERSPEKTIF INTERNASIONAL
(KONTEKS, TEORI, DAN PROFIL PEMBELAJARAN)

Editor:

Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA.

Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si.





**PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
DALAM PERSPEKTIF INTERNASIONAL
(KONTEKS, TEORI, DAN PROFIL PEMBELAJARAN)**

Editor:

Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA.

Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si.

**PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN DALAM
PERSPEKTIF INTERNASIONAL**

(Konteks, Teori, dan Profil Pembelajaran)

Editor:

Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA

Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si.



WIDYA AKSARA PRESS

PRAKATA EDITOR

Tampaknya tidak ada satu pun makhluk ciptaan Tuhan di muka bumi selain manusia yang memiliki identitas yang sangat lengkap. Selain sebagai insan Tuhan, ia juga adalah insan sosial, dan insan politik. Sebagai insan Tuhan, manusia adalah khalifah di muka bumi yang memiliki kewajiban untuk beribadat kepada Tuhan dan senantiasa memelihara dan memakmurkan bumi beserta isinya. Sebagai makhluk sosial, manusia adalah makhluk yang selalu berkawan dan bekerjasama dengan sesama dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sebagai insan politik manusia adalah warga negara, yakni anggota suatu komunitas politik, sebagaimana ditegaskan Branson (1998) bahwa anggota suatu komunitas politik adalah warga negara, karena kewarganegaraan dalam demokrasi adalah keanggotaan dalam lembaga politik. Keanggotaan di sini mengandung makna partisipasi, tapi bukan sekedar partisipasi semata. Partisipasi warga negara dalam masyarakat demokratis, harus didasarkan pada pengetahuan, refleksi kritis dan pemahaman serta penerimaan akan hak-hak dan tanggung jawab.

Di lain pihak, sebagaimana yang selama ini dipahami bahwa *ethos* demokrasi sesungguhnya tidaklah diwariskan, tetapi dipelajari dan dialami. Hal itu ditegaskan Alexis de Toqueville (Branson, 1998:2) bahwa setiap generasi adalah masyarakat baru yang harus memperoleh pengetahuan, mempelajari keahlian, dan mengembangkan karakter atau watak publik maupun privat yang sejalan dengan demokrasi konstitusional. Sikap mental ini harus dipelihara dan dipupuk melalui perkataan dan pengajaran serta kekuatan keteladanan. Demokrasi bukanlah "mesin yang akan berfungsi dengan sendirinya", tetapi harus selalu secara sadar direproduksi dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan seharusnya menjadi perhatian utama. Tidak ada tugas yang lebih penting dari pengembangan warga negara yang bertanggung jawab, efektif dan terdidik. Demokrasi dipelihara oleh warga negara yang mempunyai pengetahuan, kemampuan dan karakter yang dibutuhkan. Tanpa adanya komitmen yang benar dari warga negara terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi, maka masyarakat yang terbuka dan bebas, tak mungkin terwujud.

Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) merupakan subjek pembelajaran yang mengemban misi untuk membentuk kepribadian bangsa, yakni sebagai upaya sadar dalam "nation and character building." Dalam konteks ini peran Pendidikan

DIKLAN KEWARGANEGARAAN
M PERSPEKTIF INTERNASIONAL
ss, Teori, dan Profil Pembelajaran)

78-602-99677-2-2

: Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA
Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si.

Sampul : Ajat Sudrajat
tak : Yusman

11 : Februari 2012

t: Aksara Press
Langi Indah I No. 4 Bandung 40559

22) 2019800

widsara@yahoo.co.id

ng-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002
ng Hak Cipta

72:

ngsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud
n Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling
kat 1 (satu) bulan dan/atau den la paling sedikit Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah),
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.
0.000.000 (lima milyar rupiah).
ngsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual
da umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait
ainmana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
n dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

arganegaraan (PKn) bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa bernegara sangat strategis. Suatu negara demokratis pada rnyanya harus bersandar pada pengetahuan, keterampilan dan jikan dari warga negaranya dan orang-orang yang mereka pilih k menduduki jabatan publik.

Berdasarkan garis pemikiran di atas maka tujuan PKn pada rnyanya adalah terwujudnya partisipasi penuh nalar dan tanggung b dalam kehidupan politik warga negara yang taat kepada nilai- dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. k dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh tanggung b dalam urusan-urusan publik, diperlukan seperangkat ilmu etahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan berperan . Keterampilan ini pada gilirannya ditingkatkan lebih lanjut lusi pengembangan watak yang dapat meningkatkan kemampuan idu warga negara berperan serta dalam proses politik, yang jrutnya dapat mendukung berfungsinya sistem politik yang . Dengan demikian, PKn berfokus pada tiga komponen dasar embangan, yaitu (1) pengetahuan, (2) keterampilan, dan (3) watak karakter kewarganegaraan.

Pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta pentukan watak dan komitmen kemasyarakatan bukan semata- tanggung jawab lembaga pendidikan, terutama sekolah dan uruan tinggi. Institusi-institusi lain seperti keluarga, masyarakat, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan lain turut berperan. un demikian, sekolah dan perguruan tinggi memikul tanggung o khusus dan historis atas pengembangan kemampuan, ampilan, dan watak kewarganegaraan tersebut. Sekolah dan uruan tinggi menunaikan tanggung jawab ini melalui kurikulum al mulai sejak kelas-kelas rendah dan berlanjut dalam keseluruhan es pendidikan.

Salah satu komponen penting dalam proses pendidikan h buku pelajaran. Ketersediaan buku pelajaran yang bermutu memadai merupakan instrumen untuk menghasilkan keluaran idikan yang bermutu pula. Buku pelajaran merupakan perangkat pelajaran kurikulum yang sangat bermakna dalam memacu, ajukan, dan mencerdaskan peserta didik. Pentingnya buku sebagai a belajar tercermin melalui semboyan: "Buku adalah guru yang anpa pernah bertatap muka", "Buku adalah guru yang tak pernah ", "Buku adalah jendela informasi dunia", dan "Buku menjadi a pokok untuk menyimpan dan menyebarluaskan khasanah pengetahuan, teknologi, informasi, dan seni". Bahkan, UNESCO anangkan semboyan *Book for All*, "Buku untuk Semua".

Buku *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Internasional* ini diperuntukkan bagi para mahasiswa program pascasarjana yang sedang menekuni kajian Pendidikan Kewarganegaraan. Di samping itu buku ini juga dapat dipergunakan oleh para pembaca yang memiliki bidang minat dalam pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan, baik sebagai domain kurikulum, domain sosiokultural, maupun sebagai domain kajian ilmiah. Buku ini memberikan pemahaman tentang perkembangan program *Civic Education* dari berbagai belahan dunia, mulai dari negara-negara maju hingga pada negara-negara yang sedang berkembang. Pemahaman mengenai perkembangan *Civic Education* dari berbagai kawasan dunia akan menyadarkan kita bahwa partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dari warga negara dalam kehidupan politik dan masyarakat baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional harus dibangun melalui program pendidikan kewarganegaraan, baik dalam pengertian *Civic Education* maupun *Citizenship Education*.

Substansi buku ini sebagian merupakan reproduksi dari karya tulis para penulis. Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA mengangkat beberapa bagian dari disertasinya atas persetujuan Program Pascasarjana UPI dan dari artikel yang disajikan dalam berbagai pertemuan ilmiah. Sementara itu, Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si mengangkat secara acak dari berbagai tulisannya dan catatan lapangan dari kegiatan ilmiahnya. Demikian pula penulis lainnya, Dr. Syamsuri, M.Ag., Dr. Deny Setiawan, M.Si., dan Dikdik Baehaqi, S.Pd., M.Pd., mengangkat artikel tugas-tugas pembelajaran selama mengikuti perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Internasional pada Program Doktor PKn UPI. Dengan demikian buku ini merupakan mozaik hasil diskursus akademik kolektif-kolegial yang kaya interpretasi.

Buku ini disusun berkat dorongan dan fasilitas yang diberikan oleh berbagai pihak yang terlampau banyak jika disebutkan satu per satu. Semoga segala amal baik tersebut memperoleh balasan Allah SWT dengan berlipat ganda. Akhirulkalim, buku ini terbuka untuk masukan dari para pembaca guna perbaikan, terutama karena kehidupan berbangsa dan bernegara adalah dinamis dan senantiasa mengalami perubahan akibat perkembangan zaman.

Bumi Siliwangi, 14 Februari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA EDITOR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA dan Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si.....	1
BAB 2 PROFIL CIVIC EDUCATION DI NEGARA-NEGARA KAWASAN EROPA, AMERIKA, DAN AUSTRALIA	
Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA.....	10
A Konteks Lahirnya <i>Civic Education</i>	10
B Landasan Dikembangkannya <i>Civic Education</i>	14
C. Kerangka Sistemik <i>Civic Education</i>	24
D. Kurikulum dan Bahan Belajar <i>Civic Education</i>	33
E. Kultur Kelas dan Situs Kewarganegaraan	67
F. Ringkasan	67
G. Latihan	69
H. Kajian Lanjut	70
BAB 3 PROFIL CIVIC EDUCATION DI NEGARA-NEGARA ASIA DAN AFRIKA	
Dr. Syamsuri, M.Ag., Dr. Deny Setiawan, M.Si. dan Dikdik Baehaqi Arif, S.Pd., M.Pd.	72
A. Konteks Lahirnya <i>Civic Education</i>	73
B Landasan Dikembangkannya <i>Civic Education</i>	90
C. Kerangka Sistemik <i>Civic Education</i>	94
D. Kurikulum dan Bahan Belajar <i>Civic Education</i>	106
E. Kultur Kelas <i>Civic Education</i>	132
F. Ringkasan	138
G. Latihan	141
H. Kajian Lanjut	143
BAB 4 KOMONALITAS KARAKTERISTIK CIVIC EDUCATION	
Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA	144
A. Komonalitas Karakteristik <i>Civic Education</i>	144
B. Keunikan Profil <i>Civic Education</i> pada Masing-masing Negara	146
C. Ringkasan	163

D. Latihan	165
E. Kajian Lanjut	166
B 5 PARADIGMA UMUM KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN CIVIC EDUCATION	
Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA	
A. Struktur Kurikulum <i>Civic Education</i>	167
B. Strategi Dasar Pembelajaran <i>Civic Education</i>	178
C. Strategi Pembelajaran <i>Civic Education</i> di Sekolah	187
D. Sumber Belajar <i>Civic Education</i>	198
E. Ringkasan	207
F. Latihan	209
G. Kajian Lanjut	210

B 6 PARADIGMA ADAPTIF CIVIC EDUCATION UNTUK

NEGARA BERKEMBANG:

Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA dan Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si	
A. Pendidikan Demokrasi sebagai Konteks <i>Civic Education</i> di Negara Berkembang?	212
B. Hubungan Praksis Demokrasi dengan Pendidikan Demokrasi	223
C. <i>Civic Culture</i> Sebagai Paradigma Dasar <i>Civic Education</i> ?	233
D. Ringkasan	247
E. Latihan	249
F. Kajian Lanjut	249

B 7 MODEL ADAPTIF KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN

CIVIC EDUCATION UNTUK PENDIDIKAN

KEWARGANEGARAAN

Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si	
A. Model Dasar sebagai Sumber Adaptasi	250
B. Kerangka Adaptasi Model Pembelajaran <i>Civic Education</i>	257
C. Ringkasan	266
D. Latihan	268
E. Kajian Lanjut	268

OSARIUM	270
DAFTAR PUSTAKA	273

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Organisation of Citizenship Education in the Primary Phase	2
Tabel 2.2	Organisation of Citizenship Education in Lower and Upper Secondary Phase	2
Tabel 2.3	Overview of Essential Elements to be Reached by the end of Compulsory Schooling	3
Tabel 2.4	Average Percentage Correct for Grade 11 By Curriculum Unit	4
Tabel 2.5	Average Percentage Correct for Grade 12 By Curriculum Unit	4
Tabel 2.6	Average Percentage Correct for Highschool Students and Univ. Students By Curriculum Unit	4
Tabel 3.1	Organisation of Citizenship Education in Primary Phase	105
Tabel 3.2	Organisation of Citizenship Education in the Lower and Upper Secondary Phase	10
Tabel 3.3	Kajian <i>Civic Education</i> dalam Kurikulum <i>Social Studies</i> 1973 di Pakistan	12
Tabel 3.4	Kurikulum Pendidikan Moral di Sekolah Menengah Pertama Cina 1977-1992	12
Tabel 3.5	Hubungan antara tahap-tahap perkembangan sosial dan tujuan serta isi materi mata pelajaran Ideologi dan Moralitas di sekolah menengah pertama	12
Tabel 3.6	The strand of Social System and Citizenship with the breakdown of objectives in the three domain areas across the four key stages of education (i.e. lower and upper primary, junior and senior secondary) within Personal, Social and Humanities Education	12
Tabel 3.7	Pengembangan Konseptual PSHE Termasuk Enam Bagian Topik dan Sub Topik dalam Pembelajaran Sepanjang Hayat	12
Tabel 3.8	Konten Kajian <i>Civic Education</i> pada Pelajaran EPA	12

tahun 1975. Di dalam Undang-Undang No 2/1989 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), yang antara lain Pasal 39, menggariskan adanya Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bahan kajian wajib kurikulum semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

Sebagai implikasinya, dalam Kurikulum persekolahan tahun 1994 diperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang berisikan materi dan pengalaman belajar yang diorganisasikan secara spiral/artikuleratif atas dasar butir-butir nilai yang secara konseptual terkandung dalam Pancasila.

Bila dianalisis dengan cermat, ternyata baik istilah yang dipakai, isi yang dipilih dan diorganisasikan, dan strategi pembelajaran yang digunakan untuk mata pelajaran *Civics* atau PKN atau PMP atau PPKn yang berkembang secara fluktuatif hampir empat dasawarsa (1962-1998) itu, menunjukkan indikator telah terjadinya ketidakajekan dalam kerangka berpikir, yang sekaligus mencerminkan telah terjadinya **krisis konseptual**, yang berdampak pada terjadinya krisis operasional kurikulum. Krisis atau *dislocation* menurut pengertian Kuhn (1970) yang bersifat konseptual tersebut tercermin dalam ketidakajekan konsep seperti: *civics* tahun 1962 yang tampil dalam bentuk indoktrinasi politik; *civics* tahun 1968 sebagai unsur dari pendidikan kewarganegaraan yang bernuansa pendidikan ilmu pengetahuan sosial; PKN tahun 1969 yang tampil dalam bentuk pengajaran konstitusi dan ketentuan MPRS; PKN tahun 1973 yang diidentikkan dengan pengajaran IPS; PMP tahun 1975 dan 1984 yang tampil menggantikan PKN dengan isi pembahasan P4; dan PPKn 1994 sebagai penggabungan bahan kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang tampil dalam bentuk pengajaran konsep nilai yang disaripatkan dari Pancasila dan P4. Krisis operasional tercermin dalam terjadinya perubahan isi dan format buku pelajaran, penataran guru yang tidak artikuleratif, dan fenomena kelas yang belum banyak bergeser dari penekanan pada proses kognitif memorisasi fakta dan konsep.

Tampaknya semua itu terjadi karena memang sekolah masih tetap diperlakukan sebagai *socio-political institution*, dan masih belum efektifnya pelaksanaan metode pembelajaran serta secara konseptual, karena belum adanya suatu paradigma pendidikan kewarganegaraan yang secara ajek diterima dan dipakai secara nasional sebagai rujukan konseptual dan operasional.

Kini pada era reformasi pasca jatuhnya sistem politik Orde Baru yang diikuti dengan tumbuhnya komitmen baru kearah perwujudan cita-cita dan nilai demokrasi konstitusional yang lebih dinamis,

Pendidikan Kewarganegaraan dipandang sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, 2006). Adapun tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: (a) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; (b) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi; (c) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; (d) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Di Jepang, konteks kelahiran Pendidikan Kewarganegaraan dapat ditelusuri, terutama setelah Perang Dunia kedua (1945). Pada masa itu, perhatian pemerintah Jepang terhadap pendidikan mulai menunjukkan peningkatan. Pendidikan menjadi pusat perhatian pemerintah sebagaimana direncanakan sejak periode Meiji (abad ke-19) (Otsu, 1998:51; Ikeno, 2005:93). Periode setelah kekalahan Jepang ini, merupakan titik balik yang sangat penting bagi pendidikan di Jepang. Pendidikan Jepang mengubah orientasinya dari yang bersifat militer ke arah pendekatan yang lebih demokratis. Demikian pula perubahan dirasakan dalam Pendidikan Kewarganegaraan, mata pelajaran ini telah bergeser penekannya dari pendidikan untuk para warganegara dan pengajaran disiplin ilmu-ilmu sosial yang terkait dengan upaya untuk membangun bangsa Jepang, ke arah Pendidikan Kewarganegaraan untuk semua warganegara (Ikeno, 2005:93).

Civic Education atau Pendidikan Kewarganegaraan Jepang setelah Perang Dunia II dapat digambarkan dalam tiga periode (Ikeno, 2005:93) sebagai berikut: "*Pertama*, periodetahun 1947-1955, berorientasi pada pengalaman. *Kedua*, periode tahun 1955-1985, berorientasi pada pengetahuan, dan *ketiga*, periode tahun 1985-sekarang, berorientasi pada kemampuan".

Periode *pertama*, Pendidikan Kewarganegaraan sebagian besar diterapkan secara integratif ke dalam studi sosial. Studi sosial mengadopsi metoda-metoda pemecahan masalah, seperti penelitian dan diskusi, dan mengajarkan kehidupan sosial dan masyarakat secara umum. Di dalam kelas, para guru dan anak-anak mempertimbangkan

permasalahan kehidupan sosial dan masyarakat melalui pengalaman sosial yang diperoleh dengan pemecahan masalah. Mereka belajar tentang "masyarakat mereka sendiri" dan mengembangkan "sikap dan keterampilan-keterampilan untuk berpartisipasi secara positif untuk membangun masyarakat yang demokratis".

Pelaksanaan pembelajaran studi sosial di pada periode ini adalah melalui "yubin-gokko (*playing the post*)" dan "yamabiko-gakko (*echo school*)". Dalam praktek ini, guru mengorganisir suatu struktur yang berhubungan dengan kegiatan pos sebagai satu aktivitas untuk anak-anak. Di *yamabiko-gakko*, guru mengorganisir aktivitas penyelidikan sehingga anak-anak bisa membuat pertanyaan-pertanyaan melalui komposisi dan jawaban bebas mereka. Dalam situasi demikian, anak-anak itu melaksanakan aktivitas, sementara para guru tidak mengambil peran yang besar untuk memimpin dalam proses pembelajaran tersebut. Banyak orang mengkritik praktek pembelajaran ini, mereka berpendapat bahwa dalam praktek pembelajaran tersebut, anak-anak hanya memperoleh pengetahuan biasa yang dipelajari tanpa sengaja, dan mereka menuntut para guru studi sosial untuk mengajar ilmu sosial secara sistematis.

Pada periode yang *kedua*, Pendidikan Kewarganegaraan didasarkan atas prinsip intelektualisme yang berkembang dalam disiplin akademis. Kementerian Pendidikan Jepang memisahkan Pendidikan Moral (*dotoku*) dari studi sosial. Studi sosial dipecah menjadi Geografi, Sejarah, dan politik/ekonomi/ kemasyarakatan. Masing-masing disiplin di atas terdiri atas seperangkat pengetahuan dan keterampilan. Hal tersebut dipersiapkan agar para siswa memiliki pengetahuan inti tentang budaya Jepang secara umum. Pendidikan Kewarganegaraan periode kedua ini diarahkan agar para siswa memperoleh pengetahuan yang dianggap penting bagi bangsa Jepang. Sasaran pengajaran Pendidikan Kewarganegara pada periode kedua ini terdiri atas empat unsur (Ikeno, 2005:94), yaitu untuk mengembangkan: pengetahuan dan pemahaman, keterampilan berpikir dan ketetapan, keterampilan dan kemampuan, dan kemauan, minat, serta sikap warganegara.

Pada periode *ketiga*, Pendidikan Jepang ditekankan pada pengembangan prinsip hubungan timbal balik. Dalam hal ini, pendidikan sekolah difokuskan untuk mengembangkan "kemampuan yang diperlukan dalam kehidupan siswa", dalam arti siswa mampu menemukan suatu masalah sendiri, belajar tentang permasalahan itu, memikirkannya, menilai dengan bebas, menggunakan metode yang tepat, memecahkan masalah secara tepat, kreatif, dan memperdalam pemahamannya tentang hidup. Sasaran ini dicapai melalui integrasi

dari setiap disiplin ilmu. Karena itu, periode ini disebut sebagai "periode studi yang terintegrasi". Pendidikan Kewarganegaraan dalam periode ketiga bertujuan mempersiapkan setiap individu untuk dapat terlibat dalam secara aktif dalam masyarakat, dan menggunakan budaya umum dalam setiap hal. Penekanan Pendidikan Kewarganegaraan telah diubah dari mengutamakan pengetahuan umum tentang bangsa Jepang kepada kemampuan itu untuk membangun masyarakat. Pada periode ketiga ini, Pendidikan Kewarganegaraan Jepang sebagian besar diterapkan sebagai "kewarganegaraan (*civics*)" dalam sekolah tingkat atas, dan sebagai "studi sosial" dalam sekolah tingkat menengah (Otsu, 1998:51).

Di **Pakistan**, perkembangan pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) dan umumnya sistem pendidikan tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah politik negara tersebut. Bernadette Louise Dean (2000: 75-96) membagi perkembangan pendidikan di Pakistan menjadi sekitar enam periode: Periode 1947-1958; Periode 1958-1970; Periode 1971-1977; Periode 1977-1988; Periode 1988-1999; dan Periode 1999-sekarang.

Pada masing-masing periode acap kali ditandai oleh tantangan yang dialami sejak awal Pakistan berdiri sebagai sebuah negara merdeka. Secara internal tantangan muncul ketika ada kekuatan etnik dan provinsial menimbulkan konflik komunal, antara lain deklarasi bahasa Urdu sebagai bahasa nasional pada 1948 dan akhirnya menimbulkan kerusuhan di Pakistan Timur yang menuntut status yang sama bagi Bangla. Pakistan Timur dipisahkan oleh wilayah India dengan jarak seribu mil dari Pakistan Barat (pemerintah pusat Islamabad). Pemisahan itu pada gilirannya melahirkan kemerdekaan bangsa Bangla dan membentuk sebuah negara baru bernama Bangladesh. Secara eksternal, tantangan Pakistan ialah ketika menghadapi India sebagai negara yang sama-sama mengalami sejarah kolonialisme di bawah Inggris, pada tataran politik nasional sering melahirkan konflik-konflik di antara elit nasional Pakistan terhadap pensikapan menghadapi India.

Pergumulan yang mencolok dari perkembangan sejarah Pakistan ialah silih berganti rejim kekuasaan dari satu periode ke periode berikutnya. Mulai dari pendiri Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, kemudian digantikan oleh Liaquat Ali Khan, Jenderal Muhammad Ayub Khan, Jenderal Muhammad Yahya Khan yang kemudian kendali pemerintahan di bawah Zulfikar Ali Bhutto (Pakistan People's Party), Jenderal Zia-ul Haq; Benazir Bhutto (putri mendiang Zulfikar Ali Bhutto), Nawaz Sharief (*Islamic Jamhooria Itehad*, Aliansi Demokratis Islam), dan akhirnya pemerintahan militer Jenderal Pervez Musharraf;

mau silih berganti dari pemerintah sipil, militer, sipil dan kembali pada pemerintahan militer.

Sistem pendidikan nasional di Pakistan tidak dapat dipisahkan dari konflik antara yang menginginkan Islam sebagai dasar dan yang pendidikan nasional, dan yang menghendaki nilai-nilai sekuler demokrasi liberal. Dalam perkembangannya, kelompok yang menginginkan Islam dasar sistem pendidikan nasional menjadi kelompok dominan dan menentukan kurikulum, materi dan arah pendidikan di Pakistan. Hal ini wajar, ketika perpecahan antara kelompok nasionalis Islam dan nasionalis sekuler di daratan India pada pasca Perang Dunia II mendeklarasikan kemerdekaannya dari Inggris, maka kelompok nasionalis Islam akhirnya mendirikan sebuah negara Islam bernama Pakistan. Masing-masing transisi politik dari p-tiap periode pemerintahan membawa perdebatan yang sama antara kelompok Islam dan sekuler di Pakistan.

Konferensi Pendidikan Pakistan Tahun 1947 menarik untuk diperhatikan, terutama perihal pendidikan kewarganegaraan di negeri tersebut. Pada konferensi itu, Fazlur Rahman pada pidato pembukaannya sebagai utusan Menteri Pendidikan, menyatakan bahwa tujuan pendidikan dalam sebuah masyarakat demokratis harus memasukkan elemen-elemen "vokasional", "sosial atau politik", "spiritual" dan "fisik" (Dean, 2000: 86). Elemen spiritual merupakan tertinggi karena ia membantu "purge men's minds of barbarianism and turn them to humanitarian purposes" (sebagaimana dikutip Dean, 2000: 86). Elemen sosio-politik masuk dalam "training for citizenship," mana :

The possession of a vote by a person ignorant of the privileges and responsibilities of citizenship ... is responsible for endless corruption and political instability. Our education must ... [teach] the fundamental maxim of democracy, that the price of Liberty is eternal vigilance and it must aim at cultivating the civic virtues of discipline, integrity, and unselfish public service (dikutip dalam Dean, 2000: 86).

Oleh karenanya, menurut Fazlur Rahman pendidikan harus membuat semua anggota badan politik, termasuk semua warga negara Pakistan "no matter what political, religious or provincial label one may possess" (dikutip dalam Dean, 2000: 86).

Sebagai sebuah negara pascakolonial, Pakistan mengakui peran penting *civic education* dalam pembentukan warga negara yang patriotik. Secara paradoksal, sebagaimana kurikulum *civic education* di sekolah-sekolah pemerintah yang menekankan pembentukan sebuah identitas warga negara Muslim, ia juga telah menghindari transmisi

nilai-nilai universal demokrasi seperti kebebasan individu, kesetaraan jender, pemikiran kritis, dan menghormati keragaman agama dan kultural. Dengan kegagalan untuk mengakui manfaat dan keunggulan prinsip-prinsip dasar model demokrasi liberal dari *civic education*, menurut Iftikhar Ahmad, maka Pakistan menderita kehilangan yang tak dapat diperbaiki: Pakistan terbagi menjadi dua negara, kehilangan persatuan nasional dan menyurutkan masa lampau (Jahan, 1972 dan Oldenburg, 1980 dalam Ahmad, 2004a: 12).

Menurut Iftikhar Ahmad (2004a: 12), ada empat aspek untuk melihat konteks perkembangan *civic education* di Pakistan: negara-bangsa yang militeristik, keadaan darurat Perang Dingin, ekstrimisme agama, dan feodalisme. Sejarah Pakistan yang dominan silih berganti dari rejim militer atas sipil, menyebabkan tujuan utama kurikulum *civic education* di sekolah-sekolah menjadi penyiapan seorang warga negara yang siap perang. Kebanyakan sejarah militer yang berkuasa negeri itu, menjadikan kelas social yang dominant di Pakistan adalah militer (Cohen, 1984, dalam Ahmad, 2004a: 12). Militer dianggap sebagai kelas utama, dan nilai-nilai konformitas militer, rejimentasi, dan maskulinitas digarisbawahi dalam masyarakat secara umum dan khususnya di lembaga-lembaga pendidikan. Kurikulum resmi dan tersembunyi (*hidden curriculum*) di sekolah mendorong sebuah sikap penyeragaman dan karakter siap perang bagi anak-anak di sekolah. Kebebasan berbicara, pembangkangan, dan pemikiran kritis jarang didorong (Ahmad, 2004a: 12).

Kondisi perang dingin telah menimbulkan empatik masyarakat Pakistan dengan gerakan-gerakan sosialis, revolusioner dan kemerdekaan di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Rakyat Pakistan juga menginginkan sebuah sistem ekonomi sosialis di Pakistan. Dikotomi ini telah menciptakan sebuah ketidakpercayaan mendalam antara rakyat Pakistan dan para penguasa militer mereka. Ringkasnya, sejak rejim-rejim otoritarian di Pakistan tidak tertarik untuk mendukung nilai-nilai demokrasi liberal, maka rakyat Pakistan melihat sedikit manfaat dalam pengenalan model demokrasi liberal dalam kurikulum *civic education* di sekolah-sekolah (Ahmad, 2004a: 13).

Tanggapan terhadap penyiapan warga negara demokratis di sekolah-sekolah telah meningkatkan munculnya ideologi-ideologi dan faksi-faksi religius yang ekstrim. Selama periode 1980an, kelompok ekstrim agama menerima patronase negara dalam lembaga-lembaga pendidikan, khususnya sekolah. Kaum ekstrimis agama ini berupaya untuk membersihkan pemikiran rasional dan bebas. Guru-guru yang tertarik dengan demokrasi, kebebasan individual, dan gagasan-gagasan sekuler, menerima ancaman-ancaman dari kaum ekstrimis

ama. Kaum ini menciptakan lingkungan ketakutan, permusuhan dan intimidasi di sekolah-sekolah, akademi-akademi dan universitas-universitas.

Namun ironisnya, kelompok-kelompok ekstrim agama ini memiliki pula agenda tentang *civic education*. Mereka mengembangkan model *civic education* yang sangat kuat mempertemukan kebutuhan-kebutuhan kehidupan siswa di abad ke-21 karena visi dan tujuannya menjadi atavisme, eksklusif, dan konformis (ragam). Mereka memandang dunia dari perspektif pendahuluan dan tahu mereka yang hidup di jaman yang berbeda dan memiliki kebutuhan dan etos yang berbeda pula (Ahmad, 2004a: 13).

Feodalisme di Pakistan menjadi salah satu faktor yang menghalangi transmisi nilai-nilai demokrasi dalam kurikulum *civic education* sehingga menjadikannya tatanan sosial feodal. Sayangnya, nilai-nilai feodal telah meresap dalam jiwa bangsa. Nilai-nilai feodal memiliki akar yang kuat di Pakistan dan telah berlangsung lebih dari tahun lampau. Feodalisme menjadikan satu suku (tribal), sistem feodal dan mundur yang menghalangi kemajuan sosial, politik dan ekonomi dari warga negara biasa. Feodalisme menjadi sebuah sistem yang eksploitatif di mana kekuasaan sedikit keluarga atas banyak penduduk Pakistan. Feodalisme juga menghalangi pengetahuan, pikiran kritis, kebebasan berbicara, partisipasi kewarganegaraan, dan kesetaraan. Kaum feodal Pakistan berhasil memelihara *status quo* dengan bersekutu dalam rejim-rejim militer dan birokrasi-birokrasi. Lebih jauh, di bidang pendidikan keluarga-keluarga feodal mengirim anak-anak mereka ke sekolah-sekolah swasta elit, namun mereka menolok dana-dana pemerintah untuk pendidikan publik (Ahmad, 2004a: 13; Hasan, 2001: 77-84).

Dari empat faktor tersebut di atas, Iftikhar Ahmad (2004b) menyebutkan bahwa persoalan konflik ideologis yang bercorak sama justru mewarnai pada hampir empat faktor tersebut. Ada kompetisi visi dalam *civic education* antara agama dan negara. Pokok perdebatan kurikulum *civic education* adalah antara agama dan negara, yakni antara dua visi ideologis (teokratis dan demokratis-liberal) yang bersaing untuk hegemoni. Agama (Islam) telah menjadi *raison d'être* negara Pakistan, sehingga dukungan terhadap agenda buah negara Islam mendefinisikan warga negara yang baik melalui kerangka religius. Dalam pandangan pendekatan teokratis, seorang warga negara yang baik ialah seorang Muslim ortodoks (Government of Pakistan, 2002, dalam Ahmad, 2004b: 40). Sementara itu, kelompok demokratis-liberal menekankan pemisahan agama dengan negara, di mana warga negara didefinisikan dalam arti pluralis. Para demokratis-

liberal menekankan bahwa warganegara adalah sebuah konsep sekuler dan menghapus pengetahuan agama perlu dan cukup untuk menyiapkan warga negara yang baik (Nayyar, 2003 dalam Ahmad, 2004b: 40).

Dalam pandangan kelompok teokratis, seorang warga negara yang baik adalah seseorang yang mengikuti ajaran-ajaran Islam dan mencari untuk mengokohkan Umat Islam. Menurut doktrin ini, kurikulum pendidikan kewarganegaraan nasional seharusnya memasukkan materi pengetahuan dari Qur'an. Lebih jauh, pandangan kaum teokratis mendukung pandangan dunia yang dualistik, membagi dunia ke dalam *Dar-al-Islam* dan *Dar-al-Harb*. Para pendukungnya menyerukan jihad (perang suci) melawan "orang kafir" atau bangsa-bangsa non-Muslim, yang menjadi salah satu prinsip utama Islam. Kelompok ini menolak pandangan kaum demokrat-liberal yang dianggap sebagai tidak Islami (Ahmad, 2004b: 40, 41).

Dalam pandangan kelompok demokrat-liberal, visi seorang warga negara yang baik, secara luas, dapat dibandingkan dengan visi filosofis barat, yang memahami warga negara yang baik sebagai seseorang yang hidup dengan cita-cita demokrasi, seperti kebebasan agama dan kesetaraan. Visi model demokratis-liberal di Pakistan adalah pluralism, ketentuan non-interferensi negara dengan keyakinan para warga negara dan pengakuan keragaman kultural (Ahmed, 1987 dan 2003 dan Nayyar 2003 dalam Ahmad, 2004b: 40). Visi ini menolak pandangan kelompok teokratis yang ingin membangun Pakistan seperti negara Islam periode pertengahan, yang tidak hanya anakronis yang menolak perubahan sosial, tetapi juga mengeluarkan kaum perempuan dan warga non-Muslim dari partisipasi secara setara. Kaum demokrat-liberal menginginkan Pakistan sebagai sebuah negara-bangsa modern, yang multi-iman, multikultural, dan negara multi-etnik, dengan hak-hak yang sama untuk setiap warga negara (Ahmad, 2004b: 40). Pandangan ini konsisten dengan visi sekuler bapak pendiri negara Mohammad Ali Jinnah untuk pendirian Pakistan, sebagaimana diucapkan dalam Majelis Konstituante pada 11 Agustus 1947, sebagai berikut:

You are free; you are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or to any other place of worship in this State of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed --that has nothing to do with the business of the State (dalam Ahmad, 2004b: 41).

Sitasi tersebut memberi makna bahwa setiap orang adalah merdeka atau bebas untuk beribadat ditempat peribadatnya masing-masing sesuai dengan agama atau kepercayaannya yang dianut di negara Pakistan. Apapun yang dianut atau keyakinan

yang dipegang merupakan hal yang bersifat personal dan tak ada hubungannya dengan kegiatan kenegaraan.

Hingga pasca serangan teroris ke Amerika Serikat pada 11 September 2001, kurikulum pendidikan kewarganegaraan telah menjadi arena persaingan antara kelompok teokratis dan demokratis. Melihat dampak ekstrimisme religius terhadap masyarakat Pakistan, akhirnya Jenderal Musharraf meluncurkan agenda reformasi sosial liberal, yang disebut "pencerahan jalan tengah" (*enlightened moderation*) yang mencari citra Islam yang lebih damai dan lebih lembut, baik di dalam maupun di luar Pakistan. Fokus utama usulan agenda pembaharuan (reformasi) ialah pendidikan kewarganegaraan (Ahmad, 2004b: 41).

Di Republik Rakyat Cina (RRC, selanjutnya disebut Cina), tidak ada sebutan khusus "pendidikan kewarganegaraan" (*civic education*). Pendidikan kewarganegaraan khas Cina terletak secara elektik (*inherent*) dalam bentuk pendidikan moral. Pendidikan moral lalu berkaitan erat dengan politik di Cina. Dalam amatan Wing On Lee dan Chi Hang Ho (2005: 413), istilah "pendidikan moral" (*dao de jiao yu*) disebut juga pendidikan politik (*sixiang jiao yu*) atau pendidikan politik (*zhengzhi jiao yu*) dan atau pendidikan ideopolitik, sehingga kualitas moral bagai dua sisi mata uang yang sama kualitasnya dengan kualitas ideomoral dan atau moral-ideopolitik (*sixiang zhengzhi suzhi*). Kata istilah tersebut digunakan secara bertukaran dalam literatur pendidikan di Cina.

Secara etimologis di Cina pendidikan moral menjadi sesuatu yang esensial sebagai alat sosialisasi politik, dalam mentransmisikan nilai-nilai ideologi dan politik, tidak hanya kepada para siswa, tetapi juga untuk masyarakat luas (Lee dan Ho, 2005: 413). Dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Partai Komunis Cina (1988), *Notice on Reforming and Strengthening the Moral Education Work in Secondary and Primary Schools*, "moral education is ideological and political education. It plays an important role in upholding the socialist nature of the school" sebagaimana dikutip Lee dan Ho, 2005: 414). Dari dokumen tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan moral merupakan pendidikan teologi dan politik secara bersamaan. Dengan demikian, perubahan politik mempengaruhi perkembangan pendidikan politik di Cina. Hal serupa juga berarti bahwa pendidikan moral mencerminkan perubahan politik (Lee dan Ho, 2005: 414).

Penjelasan Wing On Lee (2006:5) tentang karakteristik pendidikan kewarganegaraan di negara-negara Asia dapat membantu pemahaman kita terhadap keberadaan pendidikan moral yang menjadi aspek pokok kurikulum pendidikan kewarganegaraan di Cina.

Sebagaimana dinyatakan oleh Kennedy dan Fairbrother (2004, dalam Lee, 2006: 5) bahwa pendidikan kewarganegaraan Asia ditandai oleh konsepsi-konsepsi keutamaan moral dan nilai-nilai personal.

Dalam kasus Cina, sebagaimana telah dipaparkan di muka, pendidikan kewarganegaraan merupakan kombinasi dari "civic education, moral education, political education and ideological education" (Lee, 2006: 5). Meskipun istilah-istilah itu dapat dibedakan, namun secara konseptual sering saling dipertukarkan dalam penerapannya. Lee dan Zhong (dalam Lee, 2006: 5) telah mengidentifikasi suatu kontinum antara orientasi secara politik *civic education* dan orientasi secara politik pendidikan moral dalam perkembangan kurikulum kewarganegaraan di Cina lebih dari 50 tahun yang lampau. Pendidikan kewarganegaraan di Cina setara (ekuivalen) dengan pendidikan ideologis dan politik pada tahun-tahun awal Pemerintahan Komunis Cina. Fokus pendidikan kewarganegaraan meningkat orientasinya kepada kualitas moral personal pada saat sekarang, meskipun elemen-elemen politik selalu hadir dalam sejarah pendidikan kewarganegaraan Cina. Dengan demikian, hubungan antara pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan moral adalah suatu kontinum di Cina, di mana pada periode awal lebih pada pendidikan kewarganegaraan tetapi pada saat sekarang lebih kepada pendidikan moral, dan tidak ada waktu tanpa satu dengan lainnya (Lee, 2006: 5).

Dalam sistem pendidikan nasional Cina ada konsep *deyu*, yang artinya sama dengan pendidikan moral. Meskipun demikian, *deyu* memiliki pengertian lebih luas tidak hanya untuk pendidikan moral, tetapi juga pendidikan ideologis dan politik, termasuk pelajaran hukum, kesehatan (fisik dan mental), pelajaran yang berkaitan dengan bekerja dan banyak kegiatan lainnya untuk pendidikan umum siswa. Arti ini lebih luas dikenal sebagai "macro-*deyu*". Mikro-*deyu* berarti hanya pendidikan moral; sedangkan yang lainnya termasuk makro-*deyu* (Li Ping, Zhong Minghua, Lin Bin dan Zhang Hongjuan, 2004: 449-450).

Pendidikan kewarganegaraan dalam bentuk pendidikan moral di Cina secara ringkas dapat dilihat kontinum perkembangannya sejak 1949 hingga sejak 1993. Pada periode 1949-1978, pendidikan moral berorientasi politik, yang dalam pelaksanaannya mendasarkan diri kepada *Common Framework for Chinese People's Political Negotiations* Partai Komunis Cina. Tugas utama pendidikan moral ketika itu ialah untuk menghancurkan ideologi-ideologi para feodalis, borjuis dan fasis, serta menanamkan keutamaan-keutamaan nasional seperti mencintai tanah air, mencintai rakyat, mencintai buruh, mencintai

u, dan mencintai kekayaan publik (CCP 1949 dalam Lee dan Ho, 2005: 419).

Pada **periode 1978-1993**, secara gradual pendidikan moral menjadi independen dari politik. Pada Pleno Ketiga dari Kongres Nasional Kesebelas (1979), dilahirkan sebuah dokumen "Behavioural Code for Primary and Secondary Students" (PRCMOE, 1979). Dari dokumen itu, tugas pendidikan moral adalah menanamkan cita-cita, kualitas moral, budaya dan disiplin siswa; afektivitas terhadap nilai-nilai air sosialis dan kewirausahaan sosialis; dedikasi terhadap pembangunan Negara; haus ilmu pengetahuan baru; dan kemauan untuk berpikir dan keberanian untuk kreatif. Pada 1988, terdapat sebuah revisi radikal dalam kurikulum pendidikan politik. Di tingkat sekolah menengah pertama, mata pelajaran 'Civics' diperkenalkan kelas 1 SMP (usia 12), 'social history' di kelas 2 SMP (usia 13), dan construction of Chinese socialism' di kelas 3 SMP (usia 14). Di tingkat sekolah menengah atas dikenalkan 'scientific view of life' untuk kelas MA (usia 15), 'economics' untuk kelas 2 SMA (usia 16), dan 'politics' untuk kelas 3 SMA. Pada 1988 pun dilahirkan satu dokumen lainnya, yaitu *Outline of Moral Education Secondary School* yang diterapkan secara umum pada 1991. Arti penting dokumen ini ialah bahwa pendidikan moral tidak lagi diembel-embeli dengan kata 'ideologi.' Pendidikan moral mulai memfokuskan kepada kurikulum kewarganegaraan dan materi. Dokumentasi ini mewajibkan pengajaran materi dan mendekatannya kepada aspek-aspek nilai, sikap dan perilaku (Lee dan Ho, 2005: 419-420). Fokus utama *Outline* mencakup:

Sosialisme dan kolektivisme berdasarkan atas patriotisme Standar moral dan perilaku siswa, dan

Adopsi sebuah pendekatan motivasional untuk mengembangkan kepercayaan diri (self-esteem), kemandirian (self-reliance), dan kekuatan diri siswa (Lee dan Ho, 2005: 420)

Pada 1993 dan 1994 Pemerintah Cina mengeluarkan dua dokumen penting yang merubah arah pendidikan moral. Dua dokumen itu ialah *Opinions on Strengthening and Improving the Party and Political Works in Higher Institutes in New Circumstances* dan *Opinions Further Strengthening and Improving Moral Education Work in Schools* (Lee dan Ho, 2005: 420). Dokumen itu meluncurkan gagasan pendidikan moral sebagai "ajaran", yang berarti bahwa pendidikan politik didefinisikan sebagai satu kombinasi pelajaran teori Marxis dan pelajaran pendidikan politik. Perbedaan dua pelajaran itu di dalam pendidikan moral itu mengaturnya pentingnya Marxisme dalam kurikulum sekolah, namun pada saat yang sama mencakup status resmi untuk

pendidikan ideopolitik. Istilah 'pendidikan ideopolitik' lebih kepada 'penanaman kualitas ideomoral.' (Lee dan Ho, 2005: 420-421).

Pada **periode sejak 1993** terjadi depolitisasi pendidikan moral, yakni ditandai dengan penerimaan kebijakan 'dua pelajaran' sebagai demarkasi untuk pendidikan moral. Ini merupakan tanda pengakuan status independen dari pendidikan moral oleh Pemerintah Cina. Sejak meluncurkannya modernisasi, maka pengajaran moralitas kewarganegaraan berorientasi kepada ekonomi pasar (Lee dan Ho, 2005: 421). Hasil yang dicapai dari periode ini ialah bahwa modernisasi dan keterbukaan Cina terhadap ekonomi pasar (kapitalisme global) menjadikan kurikulum pendidikan moral perlu mengembangkan diri sebagai pembebasan kurikulum kewarganegaraan yang berfokus kepada pertumbuhan individu dari sosialisasi politik (Lee dan Ho, 2005: 421).

Kajian perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Hong Kong sangat menarik. Pertama, sebagai bekas "negara kota" jajahan Inggris, Hong Kong mengalami satu pergeseran identitas politik dari wilayah koloni menjadi kesatuan wilayah berdaulat di bawah pemerintah China Daratan (Republik Rakyat China, RRC). Hal ini membawa akibat pada status Hong Kong sebagai daerah pemerintah khusus di dalam negara RRC yang dikenal sebagai "One Country, Two Systems." Kedua, perubahan identitas politik tadi mempengaruhi sistem politik yang pada masa kolonial Inggris, Hong Kong begitu kuat ditanamkan arti penting prinsip-prinsip pemerintahan demokrasi liberal model Inggris. Namun, setelah penyerahan kedaulatan Hong Kong kepada RRC, maka berdampak pada proses politik yang mengikuti budaya politik China yang dominan dipengaruhi Konfusianisme.

Lalu, bagaimana pengaruh perubahan politik Hong Kong pasca 1997 terhadap pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) di sekolah-sekolah Hong Kong? Dari pertanyaan ini, makalah ini berusaha mengeksplorasi perkembangan *civic education* di Hong Kong baik pada masa kolonial Inggris maupun setelah penyerahan kedaulatan pada 1 Juli 1997 hingga sekarang. Berikutnya, pada makalah ini akan berturut-turut dibahas landasan pengembangan *civic education* di Hong Kong; kerangka sistematis *civic education*; kurikulum dan bahan belajar *civic education*; serta kultur kelas dan situs kewarganegaraan dari *civic education* di Hong Kong.

Pada 1 Juli 1997 Hong Kong diserahkan kembali kepada RRC setelah sekitar satu setengah abad menjadi salah satu koloni Inggris. Dalam waktu yang lama, sejarah kolonial di Hong Kong ditandai oleh sebuah strategi depolitisasi dari pemerintah Inggris, dan warga negara

menjadi apolitis (Lee, 1999: 314). Menurut Lee Wing On (1999: 314), ada dua alasan utama menjadikan karakteristik depolitisasi Hong Kong tersebut. Pertama, secara geografis Hong Kong lebih dekat dibanding Inggris, dan China memiliki pengaruh kuat terutama dalam arti suplai pangan dan air serta kontrol terhadap arus pengungsi dan imigran. Kondisi ini mengakibatkan berpengaruh secara politik terhadap Hong Kong. Kedua, Hong Kong sendiri adalah sebuah wilayah imigran yang secara luas terdiri atas para pengungsi China. Ini mengakibatkan rakyat awam Hong Kong menjaga jarak dengan pemerintah dan badan peradilan bahkan menghindari sejauh mungkin kecenderungan politik kibat pengungsian itu. Pada gilirannya warga Hong Kong lebih memfokuskan diri kepada kegiatan-kegiatan ekonomi.

Pada 1984 ditandatangani sebuah *Sino-British Joint Declaration* sebagai satu proses dekolonisasi yang antara lain mengembalikan Hong Kong kepada RRC pada Juli 1997. Waktu 13 tahun untuk proses dekolonisasi ini memberikan kesempatan "politisasi" bagi warga Hong Kong untuk membentuk "pemerintahan sendiri" melalui pembentukan Dewan Legislatif pada 1991. Perubahan lainnya –sesuai topik makalah ini – ialah dalam kurikulum sekolah.

Civic education yang diajarkan di sekolah-sekolah sejak pertama ditawarkan pada 1950. Pada 1952, kajian *civics* bersama-sama geografian sejarah membentuk mata pelajaran baru yang disebut *social studies* di dalam kurikulum sekolah dasar (Lee, 1999:315). *Civics* diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri di sekolah menengah pertama hingga kemudian diganti oleh mata pelajaran *economic and public affairs* (EPA) pada 1965. Selanjutnya pada 1980an silabus EPA direvisi dengan tekanan pada "individual and society" dan "enhancement of political awareness" (Lee, 1999: 315). Pada 1972 di dalam *social studies* dikenalkan kajian *government* di tingkat sekolah menengah pertama, yang membahas topik hubungan antara individu dan masyarakat sama halnya dengan peran warga Negara di tingkat masyarakat local dan internasional. *Social studies* kemudian diperluas untuk tingkat sekolah menengah atas pada tahun 1984 (Lee, 1999:315-316).

Pada 1980an, mata pelajaran baru *Government and Public Affairs* (GPA) dikenalkan di sekolah menengah atas. Secara umum materi dalam Silabus GPA adalah sama untuk bagian *public affairs* dalam silabus EPA, namun GPA lebih besar menekankan kepada konsep-konsep pokok demokrasi liberal (*the rule of law*, perwakilan, *consultation*, pemilihan umum), dan studi proses politik di China. Pada 1991 dikenalkan mata pelajaran baru, *Liberal Studies*, pada tingkat matrikulasi. Mata pelajaran ini memuat enam modul di mana siswa harus memilih dua modul untuk ujiannya. Khusus untuk modul

"China Today" disajikan dalam masalah Hong Kong pada saat transisi kolonialnya (Lee, 1999:316).

Pada Agustus 1985 *Curriculum Development Committee* (CDC) Departemen Pendidikan Hong Kong meluncurkan *Guidelines on Civic Education in Schools*. *Guidelines* ini merupakan bagian dari tanggapan terhadap pendapat Pemerintah Hong Kong dalam *White Paper on the Further Development of Representative Government in Hong Kong* pada 1984, yang menganjurkan adanya "need for the public to be educated more effectively for developing the local system of government and noted the role which the Education Department would pursue in promoting civic education through the school curriculum" (CDC, 1985 dalam Lee, 1999: 318).

Pada 1993, badan *The Education and Manpower Branch of the Government Secretariat* telah menerbitkan *School Education in Hong Kong: A Statement Aims*. Pada tujuan ketujuh dinyatakan: "The school is an important agency nurturing civic responsibility and for preparing young people to adjust to rapid change in a way which promotes social stability." Kemudian, pada tujuan ke-12 dinyatakan bahwa, "School should help students to become aware of Hong Kong as a society; to develop a sense of civic duty, responsibility to the family and service to the community; and to exercise tolerance in interacting with others" (Lee, 1999: 316).

Pada 1996 dikembangkan lagi dokumen *Guidelines on Civic Education in School 1996*. Dokumen ini menyebutkan bahwa salah tujuan *civic education* di Hong Kong ialah :

To enable students to understand how the individual, as a citizen, relates to the family, the neighbouring community, the regional community, the national community and the world; and to develop in them positive attitudes and values conducive to the development of a sense of belonging to Hong Kong and China so that they are ready to contribute to the betterment of the society, the state and the world (*Guidelines on Civic Education 1996* dalam Lam, 2004: 44).

Dari sitasi tersebut dapat diketahui bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan di Hongkong adalah memfasilitasi siswa untuk mengerti bagaimana individu sebagai warganegara berhubung dengan keluarga, masyarakat sekitar, masyarakat regional, nasional, dan masyarakat dunia. Selain juga dimaksudkan mengembangkan dalam diri siswa sikap positif dan bermakna bagi pengembangan rasa memiliki Hongkong dalam sehingga mereka siap untuk memberikan sumbang dalam perbaikan kehidupan masyarakat, negara, dan dunia.

Selain *Guidelines on Civic Education in School 1996* ada dokumen lainnya yang dipergunakan dalam penyajian *civic education* di sekolah dasar dan menengah di Hong Kong. Dokumen tersebut ialah *Civic Education (Secondary 1-3) 1998* dan *Basic Education Curriculum Guide - Building on Strengths (Primary 1 - Secondary 3)* (Lam, 2004: 43).

Di sejumlah negara Islam, yakni Iran, Sudan, Pakistan, Malaysia, Aljazair, dan Mesir, John L. Esposito dan John O. Voll (1996) mengadakan studi komparatif demokrasi. Menurut temuan Esposito dan Voll (1996:11) "Keberagaman Islam dan demokratisasi di dunia Muslim berlangsung dalam konteks global yang dinamis", di mana terjadi proses "Menguatnya identitas komunal dan tuntutan terhadap partisipasi politik rakyat muncul dalam lingkungan dunia yang begitu kompleks ketika teknologi semakin memperkuat hubungan global, sementara pada saat yang sama identitas lokal, nasional, dan budaya lokal masih sangat kuat". Dari berbagai pemikiran banyak pemikir Muslim, disimpulkan bahwa:

"...proses global dalam kebangkitan agama dan demokratisasi dapat, khususnya di dunia Muslim, benar-benar saling mengisi. Kedua proses itu akan bertentangan jika "demokrasi" didefinisikan secara sangat terbatas dan dipandang hanya mungkin jika pranata-pranata khas Eropa Barat atau Amerika diterapkan, atau jika prinsip-prinsip utama Islam didefinisikan secara tradisional dan kaku" (Elposito dan Voll, 1996: 25).

Dengan kata lain proses demokrasi tidak seyogyanya selalu diukur dari kriteria demokrasi barat, tetapi dilihat secara kontekstual, karena demokrasi sendiri tidak berkembang dalam suatu situasi yang sama sosiokultural vakum.

Dengan dasar pemikiran bahwa proses demokratisasi itu ada dasarnya mencakup "...proses rekonseptualisasi yang kompleks atas tema-tema yang dianggap antidemokrasi dan selanjutnya menggabungkan konsep-konsep yang telah diperbaiki ini dengan unsur-unsur protodemokrasi dan demokrasi yang ada dalam setiap tradisi masyarakat" (Elposito dan Voll, 1996:26-27), maka akan membuka peluang bagi tumbuhnya proses demokratisasi dalam berbagai masyarakat, termasuk dalam masyarakat Muslim. Yang penting, selanjutnya ditegaskan bahwa perlunya "...mengidentifikasi unsur-unsur penentu dalam tradisi Islam yang telah didefinisikan dan dikaji ulang dengan cara-cara yang dapat diperkuat (atau melemahkan) dinamika demokratisasi di kalangan Masyarakat Muslim.

Memang diakui (Elposito dan Voll, 1996:28-39) bahwa kaum Muslim sepakat menempatkan tauhid sebagai inti dari keimanan, tradisi, dan praktik kehidupan Islam. Pengakuan bahwa "tidak ada Tuhan selain Allah", dapat diartikan bahwa bagi kaum Muslimin "...hanya ada satu kedaulatan, yakni Tuhan". Namun demikian hal ini tidak menandung arti bahwa dengan demikian Islam menolak demokrasi yang intinya adalah kedaulatan rakyat, karena dalam salah satu hadits, umat Islam diperintahkan untuk taat pada Allah, Rasul, dan pemerintah. Selain itu juga dalam Islam dikenal konsep-konsep: "khalifah" sebagai bentuk kepemimpinan politik masyarakat; "syura" sebagai tradisi musyawarah; "ijma" sebagai bentuk persetujuan; dan "ijtihad" sebagai bentuk penafsiran mandiri. Walaupun penafsiran terhadap semua konsep itu masih banyak didiskusikan dan diperdebatkan, konsep-konsep tersebut dinilai "...sangat penting bagi artikulasi demokrasi Islam dalam rangka keesaan Tuhan dan kewajiban-kewajiban manusia sebagai khalifah di muka bumi". Selain itu juga konsep-konsep itu dinilai "...memberi landasan yang efektif untuk memahami hubungan antara Islam dan demokrasi di dunia kontemporer", alam konteks kemajemukan sosiokultural yang kenyataannya tidak bisa dipungkiri. Malah menurut Maarif dalam Fatwa (2001:xiii) ditegaskan bahwa sesungguhnya "Islam sarat dengan nilai-nilai demokrasi".

Dari studi komparatif yang dilakukan Elposito dan Voll (1996:263) ditemukan adanya keanekaragaman pemahaman tentang hubungan demokrasi dan Islam di berbagai negara sampel. Namun demikian disimpulkan bahwa "Bagaimanapun keanekaragaman pemahaman dan penggunaan konsep demokrasi itu, tuntutan akan demokratisasi, partisipasi politik, dan demokrasi Islam menunjukkan diterimanya demokrasi di banyak masyarakat Muslim kontemporer. Sementara sebagian orang tetap yakin bahwa demokrasi itu tidak Islami atau anti Islam...". Di samping itu "...banyak pula kalangan Muslim yang menjadikan dukungan pada demokrasi sebagai perangkat uji bagi kredibilitas atau legitimasi rezim dan bagi partai-partai politik serta oposisi". Mengenai prospek perkembangan demokrasi di negara Muslim disimpulkan bahwa "Mengingat realitas politik dan ekonomi yang ada di banyak masyarakat Muslim, masa depan demokratisasi masih diragukan". Dengan kata lain negara-negara Muslim memiliki potensi untuk secara adaptif mengembangkan proses demokratisasi secara gradual sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya masing-masing.

Apa yang menjadi Landasan dikembangkannya Civic Education?

Dalam pasal 3 Undang-undang RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), secara imperatif digariskan bahwa «Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab». Karena itu idealisme membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadikan manusia sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab sebagai filsafat, sosio-politis dan psikopedagogis merupakan misi dari pendidikan kewarganegaraan. Secara khusus, (mission sacre) dari pendidikan kewarganegaraan. Pasal 37 ayat (1) "Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air". Dalam konteks itu pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya merupakan pendidikan kebangsaan atau pendidikan karakter bangsa. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menuntun perlunya penghayatan nilai-nilai kebangsaan yang harus dimiliki oleh warga negara sebagai suatu konsep yang utuh, yang meliputi aspek-aspek pengetahuan, sikap, dan praksi pendidikan yang utuh, yang dapat menumbuhkan "civic intelligence" dan "civic participation" serta "civic responsibility" sebagai anak bangsa dan warga negara Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bidang pendidikan yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor "value-based education". Konfigurasi atau kerangka sistemik Pkn dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut.

Pkn secara kurikulum dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab.

Pkn secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfuyen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.

c. Pkn secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengungkap nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntunan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.

Landasan Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Jepang tidak dapat dilepaskan dari konsep warganegara (*komin, citizen*) dan kewarganegaraan (*citizenship*). Oleh karena itu, penting diketahui bagaimana konsep-konsep tersebut dikonstruksi.

Untuk menjelaskan hubungan antara *citizen* dan *citizenship* di Jepang, Otsu (1998:53) mengemukakan sebagai berikut: "Related to the definition of 'citizen', 'citizenship' has a much wider meaning and can be used differently in different contexts". Berdasarkan kutipan tersebut diketahui bahwa definisi antara *citizen* dan *citizenship* dapat memiliki arti yang luas dan dapat digunakan dalam cara dan dalam konteks yang berbeda.

Lebih lanjut Otsu (1998:53) mengemukakan bahwa pada saat "studi sosial (*social studies*)" dimulai sebagai mata pelajaran inti pada tahun 1948, Kementerian Pendidikan menjelaskan bahwa 'studi sosial' tidak hanya membantu penduduk mengikuti kebijakan pemerintah, tetapi setiap penduduk secara intens belajar tentang masyarakat mereka dan untuk mengembangkan sikap dan keterampilan mereka untuk berpartisipasi secara positif dalam masyarakat mereka untuk membangun masyarakat yang demokratis.

Pada saat "kewarganegaraan" (*civics*) disiapkan sebagai suatu mata pelajaran pada sekolah menengah pada tahun 1970, Kementerian Pendidikan menggambarkan tujuan inti Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut:

1. Untuk mengembangkan kesadaran dan pemahaman tentang Jepang sebagai sebuah bangsa dan prinsip kedaulatan (*to develop an awareness and understanding of Japan as a nation and the principle of sovereignty*).
2. Untuk mengembangkan suatu konsep tentang masyarakat lokal dan negara serta cara bagaimana setiap individu dapat berkontribusi dalam satu pekerjaan di masyarakat dan negara (*to develop a concept of local community and the state and ways in which the individual can contribute to the work of the community and the state*).

Untuk menghargai hak dan tanggung jawab serta tugas dari individu dalam suatu komunitas dan masyarakat yang lebih luas (to appreciate rights and responsibilities and duties of the individual in the community and wider society).

Untuk mengembangkan kemampuan bertindak secara positif dalam hubungan antara hak dan kewajiban (to develop an ability to act positively in relation to rights and duties).

Pakistan memiliki pengalaman yang berbeda. Tanggung jawab utama pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah Pakistan berada pada mata pelajaran-mata pelajaran seperti civics, Pakistan studies, dan global studies. Untuk siswa sekolah menengah, ketiga mata pelajaran itu wajib ditempuh sebagai bagian pelajaran sejarah Pakistan yang bersifat teoritis dari kerangka "Ideologi Islam" (Ahmad, 2004b: 3).

Pada 2002 Pemerintah Pakistan melalui kementerian pendidikan telah menerbitkan kurikulum nasional untuk mata pelajaran Civic untuk kelas IX hingga XII (Ahmad, 2004b: 41). Sebelumnya, kajian civics termasuk bagian dari mata pelajaran social studies. Mata pelajaran tersebut merupakan bagian dari kurikulum nasional sebagai hasil akumulatif dari berbagai dokumen, seperti proceedings of the Pakistan Educational Conference (1947), Report of the Commission of National Education (1959), The New Education Policy 1972-80, National Education Policy and Implementation Programme (1979), National Education Commission Policy (1992), dan The Education Policy 1998-2010 (Dean, 2000: 87-96).

Pengembangan pendidikan moral sebagai bentuk khas civic education di Cina, didasarkan kepada sejumlah dokumen-dokumen Partai Komunis Cina (PKC) dan dan Pemerintah Cina itu sendiri. Antara PKC dan Pemerintah Cina itu sendiri adalah dua sisi sebuah mata uang. PKC dengan Polit Biro-nya merupakan lembaga yang menentukan jalannya pemerintahan di Cina. Dengan demikian pendidikan moral yang dilaksanakan di Cina merupakan produk bijakan lembaga tersebut, yang tentu saja nilai-nilai moral dasarnya didasarkan diri pada asas dan cita-cita partai yang mendasarkan diri pada Marxisme-Leninisme, ajaran Ketua Mao Zedong, Pikiran Deng Xiaoping dan nasionalisme Cina itu sendiri (Li Ping, Zhong Minghua, dan Bin dan Zhang Hongjuan, 2004: 459).

Reformasi pendidikan moral oleh PKC dan Pemerintah Cina pada periode sejak 1993 antara lain Proposals for reinforcing and improving primary and secondary school Deyu (CPC & State Council (CPC&SC), 2000); Program for improving civic morality (CPC, 2001); Proposals for proving the ethical, ideological and moral standards of children and young

people across the country (CPC&SC, 2004), Implementation outlines to carry forward and cultivate the national spirit in primary and secondary schools (CPC&PRC Ministry of Education (MOE), 2004); dan Rules for primary and secondary students (PRCMOE, 2004) (dalam Qi Wanxue and Tang Hanwei, 2004: 465-480). Dokumen-dokumen itulah yang sekarang menjadi dasar pengembangan dan pelaksanaan pendidikan moral di Cina.

Sebagaimana telah dipaparkan di muka bahwa, civic education di Hong Kong telah mengalami perkembangan seiring konteks politik yang berkembang. Perkembangan civic education di Hong Kong, dalam penelitian Lam Ting Kwai (2004: 10-15), terdapat beberapa aspek dominan. Aspek dominan ini mewarnai civic education itu sendiri. Dalam Civic Education Guidelines in School 1996, civic education lebih mirip sebagai pendidikan moral. Materi kajiannya meliputi pendidikan nilai-nilai, pendidikan kewarganegaraan, dan pelatihan ketrampilan kritis. Nuansa pendidikan moral dalam civic education diperkukuh dengan menjadikannya sebagai mata pelajaran tersendiri dalam Basic Education Curriculum Guide - Building on Strengths (Primary 1 - Secondary 3) yang diadarkan pada 2002 oleh Curriculum Development Council (Lam, 2004: 14).

Pada bagian lain, kedua dokumen pengembangan civic education di Hong Kong pasca 1997 tersebut bercorak pendidikan patriotik. Sebagaimana telah diketahui bahwa pada masa colonial, pendidikan nasionalistik dalam civic education di Hong Kong tidak ada. Pelajaran "Civics" digantikan oleh "Economic and Public Affairs" (EPA) ataupun "Government and Public Affairs" (GPA). Dengan demikian, pelajaran civic education menjadi "anational" (Tsang, 1998 dalam Lam, 2004: 16). Dalam laporan The Preliminary Working Committee for the Special Administration Region for the Special Administrative Region cukup tegas dinyatakan bahwa:

Civic Education in Hong Kong has been underemphasized, and is weak in nationalism and patriotism...following the resumption of Chinese sovereignty, civic education in Hong Kong should aim at building nationalism and patriotism, and at strengthening the teaching of the Basic Law and the concept of "one country, two systems." (sebagaimana dikutip Lam, 2004: 41).

Dari sitasi tersebut kita dapat memahami bahwa pendidikan kewarganegaraan di Hongkong kurang mendapat perhatian dan sangat lemah dalam nasionalisme dan patriotisme yang merujuk pada kedaulatan China. Lebih jauh pendidikan kewarganegaraan di Hongkong seyogyanya diarahkan untuk mengembangkan sikap

nasionalisme dan patriotisme dan memperkuat pembelajaran tentang hukum dasar dan konsep satu negara dua sistem.

Dari pernyataan tersebut maka tepat apa yang dikatakan oleh Lee Wing On bahwa Hong Kong :

....shows that while there is apparent declaration of nationalisation in the citizenship curriculum, the citizenship skills advocated in the citizenship curriculum can be quite globalised. In sum, ideological tension in Hong Kong's citizenship curriculum is in one way or another related to Hong Kong people's national identity, resulting from its political transition (Lee Wing On, 2006: 10).

Lebih lanjut dikatakan bahwa Hongkong dengan memasukkan nasionalisme ke dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan mendapat perhatian dalam kurikulum akan lebih memberi nuansa global. Dengan kata lain ketegangan ideologi dalam kurikulum di Hongkong merupakan dampak dari transisi politik.

Pada bagian lain, pengenalan "Civics Education" ke dalam kurikulum sekolah telah membantu siswa guna meneguhkan pemahaman kebangsaan dan rasa memilikinya, yang akan mengarah kepada pembentukan sebuah identitas nasional (Tammy Kwan, 2003: 65).

C. Bagaimana Kerangka Sistemik Civic Education?

Kerangka sistemik yang dimaksud adalah "istilah teknis yang digunakan, pendekatan yang dikembangkan, dan jumlah jam per minggu, baik untuk pendidikan dasar maupun pendidikan menengah" (Kerr, 1999; Winataputra, 2007). Secara historis epistemologis dan pedagogis, seperti diangkat oleh Winataputra (2001, 2007) pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sebagai program kurikulum dimulai dengan diintroduksikannya mata pelajaran Civics dalam kurikulum SMA tahun 1962 yang berisikan materi tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Dept. P&K: 1962). Pada saat itu, mata pelajaran Civics atau *kewarganegaraan*, pada dasarnya berisikan pengalaman belajar yang digali dan dipilih dari disiplin ilmu sejarah, geografi, ekonomi, dan politik, pidato-pidato presiden, deklarasi hak asasi manusia, dan pengetahuan tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa (Somantri, 1969:7). Istilah Civics tersebut secara formal tidak dijumpai dalam Kurikulum tahun 1957 maupun dalam Kurikulum tahun 1946. Namun secara materiil dalam Kurikulum SMP dan SMA tahun 1957 terdapat mata pelajaran tata negara dan tata hukum, dan dalam kurikulum 1946 terdapat mata pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnya memasukkan pengetahuan mengenai pemerintahan.

Kemudian dalam kurikulum tahun 1968 dan 1969 istilah *civics* dan pendidikan kewarganegaraan digunakan secara bertukar-pakai (*interchangeably*). Misalnya dalam Kurikulum SD 1968 digunakan istilah Pendidikan Kewarganegaraan yang dipakai sebagai nama mata pelajaran, yang di dalamnya tercakup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan *civics* (diterjemahkan sebagai pengetahuan kewarganegaraan). Dalam kurikulum SMP 1968 digunakan istilah Pendidikan Kewarganegaraan yang berisikan sejarah Indonesia dan Konstitusi termasuk UUD 1945. Sedangkan dalam kurikulum SMA 1968 terdapat mata pelajaran Kewarganegaraan yang berisikan materi, terutama yang berkenaan dengan UUD 1945. Sementara itu dalam Kurikulum SPG 1969 mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang isinya terutama berkenaan dengan sejarah Indonesia, konstitusi, pengetahuan kemasyarakatan dan hak asasi manusia (Dept. P&K: 1968a; 1968b; 1968c; 1969).

Selain itu, dalam kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP), digunakan beberapa istilah, yakni Pendidikan Kewarganegaraan, Studi Sosial, *Civics* dan Hukum. Untuk SD 8 tahun pada PPSP digunakan istilah Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan mata pelajaran IPS terpadu atau mirip dengan *integrated social studies* di Amerika. Di situ istilah pendidikan kewarganegaraan melihatnya diartikan sama dengan pendidikan IPS. Di Sekolah Menengah 4 tahun digunakan istilah studi sosial sebagai pengajaran IPS yang terpadu untuk semua kelas dan pengajaran IPS yang terpisah-pisah dalam bentuk pengajaran geografi, sejarah, dan ekonomi sebagai program mayor pada jurusan IPS. Selain itu juga terdapat mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran inti yang harus ditempuh oleh semua siswa. Sedangkan mata pelajaran *Civics* dan Hukum diberikan sebagai mata pelajaran mayor pada jurusan IPS (PPSP IKIP Bandung; 1973a; 1973b).

Selanjutnya dalam Kurikulum 1975 istilah Pendidikan Kewarganegaraan diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. Perubahan ini sejalan dengan misi pendidikan yang diamanatkan oleh Tap. MPR II/MPR/1973. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib untuk SD, SMP, SMA, SPG dan Sekolah Kejuruan. Mata pelajaran PMP ini terus dipertahankan baik istilah maupun isinya sampai dengan berlakunya Kurikulum 1984 yang pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 1975 (Depdikbud: 1975 a, b, c dan 1976).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggariskan adanya muatan kurikulum Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, sebagai bahan kajian wajib kurikulum semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan (Pasal 39). Kurikulum Pendidikan Dasar dan Pendidikan menengah tahun 1994 mengakomodasikan misi baru pendidikan tersebut dengan memperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, Kurikulum PPKn 1994 mengorganisasikan materi pembelajaran bukan atas dasar rumusan butir-butir nilai P4, tetapi atas dasar konsep nilai yang disaripatkan dari P4 dan sumber resminya yang ditata dengan menggunakan pendekatan spiral melalui *spiral of concept development* (Taba, 1967). Pendekatan ini mengaitkan sila-sila Pancasila dengan jargon nilainya untuk setiap jenjang pendidikan dan kelas serta catur wulan dalam setiap kelas.

Sesuai dengan Ketetapan MPR No II/MPR/1998 tentang GBHN Pendidikan Pancasila mencakup pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan bangsa serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai perjuangan khususnya nilai-nilai 1945 kepada generasi muda. Dari situ dapat dilihat bahwa Pendidikan Pancasila memiliki dimensi pendidikan ideologi, pendidikan nilai dan moral, dan pendidikan juangan.

Bila dianalisis dengan cermat, ternyata baik istilah yang dipakai, maupun rumusan misi dan organisasi isi mata pelajaran *civics*/Pengetahuan Kewargaan Negara, Pendidikan Kewargaan Negara, Pendidikan Moral Pancasila, dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, di dalam dunia persekolahan yang berkembang selama hampir empat dasawarsa (1960-an s/d awal 2000-an) menunjukkan telah terjadinya inkonsistensi pemikiran yang secara mendasar yang mencerminkan telah terjadinya krisis konseptual, dan ternyata hal itu berdampak pada terjadinya **krisis konseptual dan operasional pedagogis**.

Tidak usah merasa aneh, karena keadaan seperti ini mirip dengan situasi yang juga pernah dialami di Amerika Serikat, mana "*Civics, Civic/Citizenship Education, Social Studies/Social Science Education*" sejak kelahirannya tahun 1880-an sampai dengan terbitnya dokumen akademis NCSS (1994) "*Curriculum Standards for Social Studies: Expectations of Excellence*". Namun demikian mereka kini telah berhasil mengatasi krisis konseptual dan kurikulum. Setidaknya mereka ini telah mencapai suatu konsensus akademis dan programatik yang

pada gilirannya akan memandu terjadinya proses kurikulum yang lebih koheren.

Bagi Indonesia konsensus serupa sangatlah penting dan didambakan untuk mendapatkan paradigma yang cocok mengenai pendidikan bidang sosial di sekolah. Namun sampai dengan saat ini rasanya belum juga tercapai. Sampai dengan saat ini sesuai dengan kurikulum persekolahan tahun 1994, terdapat tiga jenis pendidikan bidang sosial yakni Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diwajibkan untuk semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan; Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebagai bendera dari kelompok mata pelajaran ilmu bumi, sejarah nasional, dan sejarah umum pada jenjang pendidikan dasar; dan mata pelajaran sosial yang berdiri sendiri secara terpisah seperti geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan tata negara di sekolah menengah.

Dalam upaya mencari kesepakatan, yang kalau bisa dapat melahirkan "*curriculum standards*" seperti di Amerika Serikat, ada beberapa pertanyaan yang perlu dicari bersama-sama jawabannya, antara lain: *Tujuan pendidikan nasional yang mana yang secara logis seyogyanya menjadi garapan utama bidang pendidikan sosial? Bagaimana paradigma pembelajaran bidang pendidikan kewarganegaraan di sekolah?*

Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, perlu diadakan pengkajian khusus terhadap perkembangan pemikiran mengenai pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan tahun 1999 sebagai titik akhir abad ke 20. Hal itu dapat dilihat dari cita-cita, konsep, nilai, prinsip yang secara konseptual tersurat dan atau tersirat dalam berbagai dokumen resmi, yang memang merupakan pilar-pilar pendidikan nasional Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam buku "Lima Puluh tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia" (Djojonegoro: 1996), dan berbagai dokumen resmi lainnya sejak tahun 1995 sampai sekarang.

Di dalam teks Proklamasi, yang merupakan rumusan *the highest political decision* bangsa Indonesia, pada kalimat pertama dengan tegas dinyatakan Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dengan proklamasi tersebut berarti kita pada saat itu memasuki kehidupan bermasyarakat-bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Selanjutnya di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disyahkan oleh dan dalam Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, selain ditegaskan kembali tentang pertimbangan pokok dan pernyataan kemerdekaan Indonesia, sebagaimana tersurat dalam alinea pertama, kedua, dan ketiga, juga dinyatakan tujuan dan dasar negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam alinea keempat. Dalam

nea tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa pemerintah negara Indonesia dibentuk untuk: ...melindungi segenap bangsa Indonesia dan uruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan tertib dunia yang berdasarkan perdamaian abdi dan keadilan sosial, ... (Republik Indonesia, 1945 dalam BP7 Pusat:1994). Jika dikaji dengan cermat, tujuan yang ketiga, yaknimencerdaskan kehidupan bangsa, secara tersirat mengandung arti bahwa kehidupan yang perlu dibangun itu adalah kehidupan masyarakat-bangsa Indonesia yang ...das.

Lebih jauh ditegaskan dalam alinea tersebut, kehidupan masyarakat-bangsa tersebut ditata dengan Undang-Undang Dasar negara Indonesia, dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Di situ juga tersirat bahwa negara Republik Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Lebih lanjut ditegaskan bahwa yang menjadi dasar kehidupan masyarakat-bangsa Indonesia adalah: "Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/pemilihan umum, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Dengan kata lain, kehidupan masyarakat-bangsa Indonesia yang hendak diwujudkan adalah masyarakat-bangsa yang cerdas, religius, adil dan beradab, bersatu, demokratis, dan sejahtera. Karakteristik internal-konseptual masyarakat tersebut, pada dasarnya sangat koheren dengan konsep dan nilai masyarakat madani. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran", dengan "mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang" (Pasal 31 UUD 1945). Di dalam pasal tersebut tersirat adanya upaya yang sengaja untuk mengembangkan warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius, yang secara programatik merupakan tujuan dan misi dari pendidikan kewarganegaraan dalam arti yang sangat luas, atau *citizenship education* menurut Cogan (1996). Penegasan mengenai tujuan dan misi tersebut secara konsisten dipertahankan dalam berbagai dokumen resmi yang berkenaan dengan pendidikan di Indonesia, seperti akan dibahas lebih lanjut dalam uraian berikutnya.

Secara historis, dalam usulan yang diajukan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BP KNIP tanggal 29 Desember 1945 (Djojonegoro, 1996:73) ditegaskan bahwa "Untuk menyusun masyarakat baru perlu adanya perubahan pedoman pendidikan dan

pengajaran. Paham perseorangan yang pada saat itu berlaku haruslah diganti dengan paham kesucilaan dan peri kemanusiaan yang tinggi. Pendidikan dan pengajaran harus membimbing murid-murid menjadi warganegara yang mempunyai rasa tanggung jawab". Kemudian oleh Kementerian PPK dirumuskan tujuan pendidikan "... untuk mendidik warga negara yang sejati yang bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat", dengan sifat-sifat sebagai berikut.

"Perasaan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa; Perasaan cinta kepada alam; Perasaan cinta kepada negara; Perasaan cinta dan hormat kepada ibu dan bapak; Perasaan cinta kepada bangsa dan kebudayaan; Perasaan berhak dan wajib ikut memajukan negaranya menurut pembawaan dan kekuatannya; Keyakinan bahwa orang menjadi bagian tak terpisah dari keluarga dan masyarakat; Keyakinan bahwa orang yang hidup dalam masyarakat harus tunduk pada tata tertib; Keyakinan bahwa pada dasarnya manusia itu sama derajatnya sehingga sesama anggota masyarakat harus saling menghormati, berdasarkan rasa keadilan dengan berpegang teguh pada harga diri; dan Keyakinan bahwa negara memerlukan warga negara yang rajin bekerja, mengetahui kewajiban, dan jujur dalam pikiran dan tindakan." (Djojonegoro, 1996:75-76)

Dari semua karakteristik tersebut, karakteristik perasaan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta kepada negara, cinta kepada bangsa dan kebudayaan, berhak dan wajib ikut memajukan negaranya, keyakinan hidup tak terpisah dari keluarga dan masyarakat, keyakinan harus tunduk pada tata tertib, keyakinan sama derajat dengan sesama anggota masyarakat, mengetahui kewajiban, dan jujur dalam pikiran dan tindakan, pada dasarnya termasuk ke dalam bingkai tujuan dan misi pendidikan untuk pengembangan warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius, yang merupakan garapan dari bidang pendidikan kewarganegaraan. Hakikat tujuan pendidikan tersebut, di dalam Undang-Undang No.4 tahun 1950, Bab II, Pasal 3 (Djojonegoro, 1996:76) dirumuskan menjadi " membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air". Di situ pun, hakikat pengembangan warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius secara konsisten dipertahankan.

Dalam kurikulum atau Rencana Pelajaran Sekolah Rakyat tahun 1947, walaupun hakikat tujuan membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius itu sudah ditegaskan, ternyata tidak diwadahi oleh mata pelajaran khusus dengan nama semacam

ewarganegara, tapi tampaknya diwadahi oleh mata pelajaran Pendidikan Budi Pekerti mulai dari kelas I s/d VI, dan Pendidikan Agama mulai kelas IV s/d VI. Di dalam Kurikulum SMP tahun 1962 juga ada diwadahi oleh Budi Pekerti yang diintegrasikan kedalam semua mata pelajaran dan usaha sekolah, mata pelajaran Agama yang diatur oleh Kementerian Agama, dan Kelompok Pengetahuan Sosial yang mencakup Ilmu Bumi dan Sejarah. Sedangkan di dalam Kurikulum MA tahun 1950/1951, kelihatannya diwadahi oleh mata pelajaran Mata Negara, Sejarah, dan Ilmu Bumi. (Djojonegoro, 1996:96-100)

Pada tahun 1954 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1954 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, yang ada dasarnya merupakan pemberlakuan kembali UU No 4 tahun 1950 di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam urun waktu berlakunya undang-undang tersebut terbit Keputusan Presiden RI No.145 Tahun 1965, yang isinya antara lain menetapkan tujuan pendidikan nasional untuk "...melahirkan warga negara sosialis, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya Masyarakat Sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spirituil maupun materiil dan yang berjiwa Pancasila" (Djojonegoro, 1996:103). Tujuan tersebut, tampaknya bersifat ambivalen karena menekankan pada pengembangan warga negara sosialis, dan yang berjiwa Pancasila, dan memberi indikasi nasuknya paham komunisme, yang memang pada saat itu masuk melalui PGRI non-vakentral yang beraliran kiri. Pada era inilah di SMP dan SMA muncul mata pelajaran "Civics" yang isinya didominasi oleh materi indoktrinasi Manipol USDEK. Walaupun namanya pelajaran Civics, yang mestinya secara programatik mengembangkan *civic virtue* dan *civic culture*, dan berorientasi pada pengembangan warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius, dalam kenyataannya digunakan untuk keperentingan indoktrinasi penguasa pada saat itu.

Keadaan ini berlangsung terus sampai tumbangnya pemerintahan Orde Lama dan lahirnya pemerintahan Orde Baru, yang kemudian menerbitkan Kurikulum SD tahun 1968, dan Kurikulum SMP dan SMA tahun 1969. Dalam Kurikulum SD 1968 muncul mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara yang mencakup Ilmu Bumi dan Sejarah Indonesia, dan Civics (Pengetahuan Kewargaan Negara), dan dalam Kurikulum SMP dan SMA muncul mata pelajaran Kewargaan Negara. Mata pelajaran tersebut, serta merta diisi dengan materi UUD 1945, Ketetapan MPRS/MPR, serta dokumen resmi lainnya dengan misi utama untuk meningkatkan pemahaman terhadap UUD 1945 serta berbagai Ketetapan MPRS/MPR. Keadaan tersebut berlangsung sampai berlakunya Kurikulum SD, SMP, SMA, SPG tahun 1975/1976 (Winataputra: 1978).

Jika dianalisis secara cermat, baik ide, instrumentasi, maupun praksisnya, walaupun namanya sudah menjadi Pendidikan Kewargaan Negara, yang dapat diidentikkan dengan *Civic Education* di Amerika Serikat, nuansa kurikulumnya masih kental dengan sifat indoktrinasi dengan sedikit aplikasi pendekatan yang demokratis. Harus dikatakan bahwa pengembangan *civic virtue* dan *civic culture*, sesungguhnya belum banyak mendapat perhatian. Keadaan ini juga belum mendapat dukungan kajian akademis yang memadai, karena memang program pendidikan guru pendidikan kewargaan negara yang ada di IKIP/STKIP/FKIP baru saja (mulai tahun 1966) berubah nama menjadi Jurusan/Program Studi "Civics Hukum", yang kurikulumnya lebih bernuansa pendidikan hukum dan tata negara, ditambah sedikit materi tentang *civic education*. Dengan sendirinya penelitian yang ada pun tampaknya belum mendukung perkembangannya paradigma *civic education* yang khas untuk kondisi Indonesia. Oleh karena itu dapat dipahami mengapa kurikulum Pendidikan Kewargaan Negara begitu dengan mudah berubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila, tanpa kerangka paradigmatis *civic education* yang secara akademis solid, dan secara pedagogis adaptif untuk Indonesia.

Dalam kondisi belum berkembangnya paradigma *civic education* untuk Indonesia, pada tahun 1975/1976 muncul mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang visi dan misinya berorientasi pada *value inculcation* dengan muatan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Kondisi ini bertahan sampai disempurnakannya Kurikulum PMP tahun 1975/1976 menjadi Kurikulum PMP tahun 1984, dengan visi dan misi yang sama namun dengan muatan baru Pedoman Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila (P-4) atau Eka Prasetya Pancakarsa, dengan 36 butir nilai Pancasila sebagai muatannya. Namun demikian visi dan misinya masih kental dengan *value inculcation*, yang pada dasarnya merupakan improvisasi dari *unavoidable indoctrination*.

Yang perlu dicatat, adalah dengan berubahnya Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) baik menurut Kurikulum tahun 1975/1976 maupun Kurikulum tahun 1984, pengembangan *civic virtue* dan *civic culture* dalam praksis demokrasi, yang seyogyanya menjadi jati diri PKN, berubah menjadi pendidikan perilaku moral, yang dalam kenyataannya lepas dari konteks pendidikan cita-cita, nilai, dan konsep demokrasi. Hal ini terjadi, seperti juga pada perubahan kurikulum 1968 menjadi kurikulum 1975, antara lain karena belum berkembangnya paradigma *civic education* yang melandasi dan memandu pengembangan kurikulumnya.

Keadaan itu ternyata terus berlanjut sampai berubahnya Kurikulum PMP 1984 menjadi Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tahun 1994, yang walaupun namanya mencakup kajian pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan sesuai dengan Undang-Undang No 2 tahun 1989, tetapi karakteristik kurikulumnya sangat kental dengan pendidikan moral Pancasila, yang didominasi oleh proses *value inculcation* dan *knowledge dissemination*

Hal tersebut dapat disimak dari profil kurikulum PPKn 1994, yang menunjukkan karakteristik sebagai berikut (Depdikbud: 1993).

1. Di SD PPKn bertujuan untuk **Menanamkan sikap dan perilaku** dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan kepada nilai-nilai Pancasila baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, dan **memberikan bekal kemampuan** untuk mengikuti pendidikan di SLTP" (Depdikbud, 1993: 1). Sementara itu di SLTP, PPKn bertujuan untuk **Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan** memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila dalam rangka pembentukan sikap dan perilaku sebagai pribadi, anggota masyarakat dan warga negara yang bertanggung jawab serta **memberi bekal kemampuan** untuk mengikuti pendidikan di jenjang pendidikan menengah" (Depdikbud, 1994:2). Sedangkan di SMU, PPKn bertujuan untuk **Meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan kemampuan** memahami, menghayati, dan meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman berperilaku dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan, dan **memberi bekal kemampuan** untuk belajar lebih lanjut" (Depdikbud, 1994b:2) (Cetak tebal dari penulis).
2. Materi pembelajaran dikembangkan berdasarkan butir-butir konsep nilai yang tercakup dalam masing-masing sila Pancasila, kemudian diorganisasikan secara artikulatif antar catur wulan pada setiap kelas dan jenjang (SD,SLTP,SMU). Dengan cara itu butir nilai setiap sila Pancasila muncul pada setiap catur wulan di setiap kelas dan setiap jenjang, dalam label nilai yang berbeda, atau label yang sama dengan deskripsi yang berbeda. Pendekatan kurikulum spiral, yakni *spiral of concept development* ala Taba (1967) tampaknya diterapkan secara ketat untuk tercapainya prinsip *continuity, integration, and articulation* (Tyler: 1949), namun mengabaikan konteks setiap kluster nilai, yang di dalam kenyataannya merujuk kepada satu atau beberapa disiplin atau konteks sosial budaya.
3. Karena begitu ketatnya penerapan prinsip artikulasi dalam pengorganisasian materi pembelajaran, dan dengan merujuk

kepada butir nilai yang begitu detail, maka proses pembelajaran menjadi sangat atomistik dengan konteks yang cenderung sangat fenomenalistik. Keadaan itu sangat paradoksal dengan hakikat kehidupan bermasyarakat-bangsa dan bernegara yang cenderung lebih bersifat dan bemuansa holistik. Oleh karena itu proses pembelajaran lebih mendorong pada penerimaan nilai Pancasila sebagai hapalan dari pada sebagai tilikan holistik yang kontekstual.

Sekali lagi disitu ditemukan bahwa dalam Kurikulum PPKn 1994, nuansa paradigmatik *civic education*-nya belum terasa. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa PPKn 1994, secara paradigmatik sesungguhnya masih sama dengan PMP sebelumnya. Atau dengan kata lain, Pendidikan Pancasila masih tetap berperan sebagai *core* atau *concerto*-nya, dengan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu *accompaniment*-nya. Dari situ dapat dipahami, mengapa perilaku demokratis yang cerdas dan religius, yang menjadi karakteristik *civic education* dalam masyarakat madani, belum sepenuhnya berkembang dalam masyarakat-bangsa Indonesia. Hal itu tampak dalam berbagai gejala *lawlessness* atau ketakpatuhan hukum yang melanda semua lapisan masyarakat-bangsa Indonesia saat ini. Demokrasi ternyata kini lebih banyak diucapkan sebagai retorika politik, dari pada diwujudkan dalam perilaku bermasyarakat-bangsa dan bernegara Indonesia. Seperti yang didikan moral Pancasila yang disampaikan melalui PPKn di sekolah dan Penataran P-4 di berbagai lapisan masyarakat nyaris tanpa bekas dan tanpa makna (*meaningless*).

Dari analisis terhadap perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sampai dengan saat ini, dapat dikatakan bahwa baik dalam tataran konseptual maupun dalam tataran praksis terdapat kelemahan paradigmatik yang sangat mendasar. Yang paling menonjol adalah kelemahan dalam konseptualisasi pendidikan kewarganegaraan, penekanan yang sangat berlebihan terhadap proses pendidikan moral yang behavioristik, ketakkonsistenan penjabaran dimensi tujuan pendidikan nasional kedalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan, dan keterisolasian proses pembelajaran nilai Pancasila dengan konteks disiplin keilmuan dan sosial-budaya.

Keadaan ini tampaknya disadari oleh para pakar dan pengambil keputusan pendidikan sebagai suatu tantangan yang perlu segera dijawab. Lebih-lebih lagi karena pada saat ini berbagai perubahan dalam koridor pendemokratisasian pendidikan, termasuk gagasan untuk mengembangkan paradigma baru pendidikan demokrasi mulai mengkristal, seperti yang dipikirkan oleh Tim Peduli Reformasi

Tabel 3.1
Organisation of Citizenship Education in Primary Phase

Country	Terminology	Approach	Hours per week
Japan	Social studies, living experiences and moral education	Statutory core separate and integrated	175 x 45 minutes per year

Sumber: Kerr, (1999:18)

Tabel di atas dapat menggambarkan kerangka sistemik pendidikan kewarganegaraan pada tingkat pendidikan dasar. Terminologi yang digunakan untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah "Social studies, living experiences and moral education". Kedudukan dalam program pendidikan bersifat wajib yang dikemas sebagai materi inti yang terintegrasi atau secara berdiri sendiri. Beban belajar perminggu adalah 175 x 45 menit per tahun.

Sementara itu, Pendidikan Kewarganegaraan untuk tingkat pendidikan lanjutan pertama dan tingkat atas dapat dilihat dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Organisation of Citizenship Education in the Lower and Upper Secondary Phase

Country	Terminology	Approach	Hours per week
Japan	Social studies, living experiences and moral education	Statutory core Integrated and specific	175 x 45 minutes per year (grade 7 & 8) 140 x 50 minutes per year (grade 9) 140 x 50 minutes per year (upper secondary)

Sumber: Kerr, (1999:19)

Untuk sekolah lanjutan tingkat pertama dan atas, bahan kajian atau mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan digunakan istilah "Social studies, living experiences and moral education". Kedudukan dalam program pendidikan bersifat wajib yang dikemas sebagai materi inti yang terintegrasi atau secara berdiri sendiri. Beban belajar perminggu adalah: tingkat lanjutan pertama: 175 x 45 menit per tahun untuk tingkat 7 dan 8, dan 140 x 50 menit per tahun untuk tingkat 9. Sedangkan untuk tingkat atas adalah 140 x 50 menit per tahun.

endidikan (1999) yang melihat betapa pentingnya upaya pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, alih generasi, dan pemberdayaan generasi muda untuk masa depan. Keadaan itu menuntut upaya pengembangan paradigma baru pendidikan kewarganegaraan.

Sejalan dengan telah terjadinya perubahan paradigma makro konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia sesuai dengan UUD 1945, telah diundangkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menggantikan Undang-undang RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas. Khusus berkenaan dengan pendidikan kewarganegaraan, di dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 tersebut ditegaskan bahwa materi kajian pendidikan kewarganegaraan wajib termuat baik dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah maupun kurikulum pendidikan tinggi (Pasal 7). Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang difokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (BSNP, 2006). Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diberikan selama 2 jam pelajaran per minggu itu bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.

Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi.
Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Kontek lahirnya Civic Education di Jepang agak berlainan dengan yang terjadi di Indonesia. Pada Tabel 3.1 disajikan pengorganisasian Civic Education di Jepang pada pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan pertama dan tingkat atas.

Di luar negara-negara tersebut di atas diperoleh informasi adanya berbagai upaya perintisan "citizenship education". Di Uganda "uwangue dan Ntambi:2001) "citizenship education" dan "political education" diajarkan di sekolah menengah. Sementara di sekolah dasar menyusur "citizenship education" dan "political education" diintegrasikan ke dalam "social studies". Secara keseluruhan untuk mendukung pembelajaran tersebut dikembangkan "national guidelines" sebagai pedoman pelaksanaan di sekolah. Sementara itu di Afrika Selatan (Ndevu:2001) "citizenship education" secara khusus diajarkan dalam mata pelajaran "Life Orientation" dan secara terintegrasi diajarkan dalam mata pelajaran "Human and Social Science" (HSS), Language and Communication, dan Economic and Management". Semua mata pelajaran tersebut diajarkan di semua tingkatan.

4. Bagaimana Kurikulum dan Bahan Belajar Civic Education?

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (UU 20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 (PP 19/2005) tentang Standar Nasional Pendidikan mengamatkan bahwa KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada SI dan SKL serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Selain dari itu, penyusunan KTSP juga harus mengikuti

ketentuan lain yang menyangkut kurikulum dalam UU 20/2003 dan PP 19/2005.

Dalam Pasal 36 ayat 1 UU No. 20/2003 ditegaskan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya dalam ayat 2 ditegaskan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Prinsip inilah yang melandasi dikembangkannya KTSP sebagai kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan

Ketentuan mengenai penyusunan kurikulum ditegaskan dalam UU No. 20/2003 ayat 3, yaitu bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

- peningkatan iman dan takwa;
- peningkatan akhlak mulia;
- peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
- keragaman potensi daerah dan lingkungan;
- tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
- tuntutan dunia kerja;
- perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- agama;
- dinamika perkembangan global; dan
- persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Bagaimana halnya dengan materi muatan kurikulum? Dalam UU No. 20/2003 pasal 37 ayat 1 ditegaskan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

- pendidikan agama;
- pendidikan kewarganegaraan;
- bahasa;
- matematika;
- ilmu pengetahuan alam;
- ilmu pengetahuan sosial;
- seni dan budaya;
- pendidikan jasmani dan olahraga;
- keterampilan/kejuruan; dan
- muatan lokal.

Untuk melaksanakan ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana diatur dalam UU No. 20/2003, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Standar Nasional Pendidikan. Ketentuan mengenai kurikulum yang diatur dalam PP No. 19/2005 ini antaranya adalah tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum. Dalam Pasal 6 ditegaskan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

- kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
- kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;
- kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
- kelompok mata pelajaran estetika;
- kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.

Setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara holistik sehingga pembelajaran masing-masing kelompok mata pelajaran mempengaruhi pemahaman dan/atau penghayatan peserta didik. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada D/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/MALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani.

Hal lain yang diatur dalam PP No. 19/2005 adalah berkenaan dengan kedalaman muatan kurikulum. Dalam Pasal 8 PP No. 19/2005 ditegaskan bahwa kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi pada setiap tingkat dan/atau semester sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi sebagaimana dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ketentuan mengenai kedalaman muatan kurikulum dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Dalam hal ini terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Berikut disajikan standar isi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, yang meliputi Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar.

1. Jenjang SD/MI/SDLB/Paket A

Kelas I, Semester 1			
No	Standar Kompetensi	No	Kompetensi Dasar
1.	Menerapkan hidup rukun dalam perbedaan	1.1	Mengenal perbedaan jenis kelamin, agama, suku bangsa
		1.2	Memberikan contoh hidup rukun melalui kegiatan di rumah dan di sekolah
		1.3	Menerapkan hidup rukun di rumah dan di sekolah
2.	Membiasakan tertib di rumah dan di sekolah	2.1	Menjelaskan pentingnya tata tertib di rumah dan di sekolah
		2.2	Melaksanakan tata tertib di rumah dan di sekolah
Kelas I, Semester 2			
3	Menerapkan hak anak di rumah dan di sekolah	3.1	Menjelaskan hak anak untuk bermain, belajar dengan gembira dan didengar pendapatnya
		3.2	Melaksanakan hak anak di rumah dan di sekolah
4	Menerapkan Kewajiban anak di rumah dan di sekolah	4.1	Mengikuti tata tertib di rumah dan di sekolah
		4.2	Melaksanakan aturan yang berlaku di sekolah
Kelas II, Semester 1			
1	Membiasakan hidup bergotong royong	1.1	Mengenal pentingnya hidup rukun, saling berbagi, dan tolong menolong
		1.2	Melaksanakan hidup rukun, saling berbagi, dan tolong menolong di rumah dan di sekolah
2	Menampilkan sikap cinta lingkungan	2.1	Mengenal pentingnya lingkungan alam seperti dunia tumbuhan dan dunia hewan
		2.2	Melaksanakan pemeliharaan lingkungan alam
Kelas II, Semester 2			
3	Menampilkan sikap demokratis	3.1	Mengenal kegiatan bermusyawarah
		3.2	Menghargai suara terbanyak (mayoritas)
		3.3	Menampilkan sikap mau menerima kekalahan

4	Menampilkan nilai-nilai Pancasila	4.1 Mengenal nilai kejujuran, kedisiplinan, dan senang bekerja dalam kehidupan sehari-hari	4.2 Melaksanakan perilaku jujur, disiplin, dan senang bekerja dalam kegiatan sehari-hari
Kelas III, Semester 1			
1	Mengamalkan makna Sumpah Pemuda	1.1 Mengenal makna satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa	1.2 Mengamalkan nilai-nilai sumpah pemuda dalam kehidupan sehari-hari
2	Melaksanakan norma yang berlaku di masyarakat	2.1 Mengenal aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar	2.2 Menyebutkan contoh aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar
		2.3 Melaksanakan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat sekitar	
Kelas III, Semester 2			
3	Memiliki harga diri sebagai individu	3.1 Mengenal pentingnya memiliki harga diri	3.2 Memberi contoh bentuk harga diri, seperti menghargai diri sendiri, mengakui kelebihan dan kekurangan diri sendiri dan lain-lain
		3.3 Menampilkan perilaku yang mencerminkan harga diri	
4	Memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia	4.1 Mengenal kekhazanah bangsa Indonesia seperti, keblinekaan, kekayaan alam, keramah-tamahan	4.2 Menampilkan rasa bangga sebagai anak Indonesia
Kelas IV, Semester 1			
1	Memahami sistem pemerintah desa dan pemerintah kecamatan	1.1 Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan	1.2 Menggambarkan struktur organisasi pemerintah desa dan pemerintah kecamatan
2	Memahami sistem pemerintahan kabupaten, kota dan provinsi	2.1 Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintah kabupaten kota dan provinsi	2.2 Menggambarkan struktur organisasi kabupaten, kota dan provinsi

Kelas IV, Semester 2			
3	Mengenal sistem pemerintahan tingkat pusat	3.1 Mengenal lembaga-lembaga negara dalam susunan pemerintahan tingkat pusat, seperti MPR, DPR, Presiden, MA, MK, BPK dan lain-lain	3.2 Menyebutkan organisasi pemerintahan tingkat pusat, seperti Presiden, Wakil Presiden dan para Menteri
4	Menunjukkan sikap terhadap globalisasi di lingkungannya	4.1 Memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya	4.2 Mengidentifikasi jenis budaya Indonesia yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional
		4.3 Menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di lingkungannya	
Kelas V, Semester 1			
1	Memahami pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	1.1 Mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1.2 Menjelaskan pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
		1.3 Menunjukkan contoh-contoh perilaku dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
2	Mentaati peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah	2.1 Menjelaskan pengertian dan pentingnya peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah	2.2 Memberikan contoh peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah, seperti pajak, anti korupsi, lalu lintas dan larangan merokok
Kelas V, Semester 2			
3	Memahami kebebasan berorganisasi	3.1 Mendeskripsikan pengertian organisasi	3.2 Menyebutkan contoh organisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat
		3.3 Menampilkan peran serta dalam memilih organisasi di sekolah	
4	Menghargai keputusan bersama	4.1 Mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama	4.2 Mematuhi keputusan bersama
Kelas VI, Semester 1			
1	Menghargai nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara	1.1 Mendeskripsikan nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara	

2	Memahami sistem pemerintahan Republik Indonesia	1.2 Menceritakan secara singkat nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara
		1.3 Meneladani nilai-nilai juang para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara
		2.1 Menjelaskan proses Pemilu dan Pilkada
3	Memahami peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara	2.2 Mendeskripsikan lembaga-lembaga negara sesuai UUD 1945 hasil amandemen
		2.3 Mendeskripsikan tugas dan fungsi pemerintahan pusat dan daerah
		3.1 Menjelaskan pengertian kerjasama negara-negara Asia Tenggara
4	Memahami peranan politik luar negeri Indonesia dalam era globalisasi	3.2 Memberikan contoh peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara
		4.1 Menjelaskan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif
		4.2 Memberikan contoh peranan politik luar negeri Indonesia dalam percartaran internasional

Sumber : BSNP (2006)

2. Jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B

Kelas VII, Semester 1		
1	Menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, dan bernegara	1.1 Mendeskripsikan hakikat norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan, yang berlaku dalam masyarakat
		1.2 Menjelaskan hakikat dan arti penting hukum bagi warganegara
		1.3 Menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2	Mendeskripsikan makna Proklamasi Kemerdekaan dan konstitusi pertama	2.1 Menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan
		2.2 Mendeskripsikan suasana kebatinan konstitusi pertama
		2.3 Menganalisis hubungan antara proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945

		2.4 Menunjukkan sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan dan suasana kebatinan konstitusi pertama
Kelas VII, Semester 2		
3	Menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan penegakan Hak Azasi Manusia (HAM)	3.1 Menguraikan hakikat, hukum dan kelembagaan HAM
		3.2 Mendeskripsikan kasus pelanggaran dan upaya penegakan HAM
		3.3 Menghargai upaya perlindungan HAM
		3.4 Menghargai upaya penegakan HAM
4	Menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat	4.1 Menjelaskan hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat
		4.2 Menguraikan pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab
		4.3 Mengaktualisasikan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab
Kelas VIII, Semester 1		
1	Menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila	1.1 Menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara
		1.2 Menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara
		1.3 Menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
		1.4 Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat
2	Memahami berbagai konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia	2.1 Menjelaskan berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia
		2.2 Menganalisis penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang berlaku di Indonesia
		2.3 Menunjukkan hasil-hasil amandemen UUD 1945
		2.4 Menampilkan sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen
3	Menampilkan ketaatan terhadap perundang-undangan nasional	3.1 Mengidentifikasi tata urutan peraturan perundang-undangan nasional
		3.2 Mendeskripsikan proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional
		3.3 Mentaati peraturan perundang-undangan nasional

		3.4 Mengidentifikasi kasus korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
		3.5 Mendeskripsikan pengertian anti korupsi dan instrumen (hukum dan kelembagaan) anti korupsi di Indonesia
Kelas VIII, Semester 2		
4	Memahami pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan	4.1 Menjelaskan hakikat demokrasi 4.2 Menjelaskan pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 4.3 Menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan
5	Memahami kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan di Indonesia	5.1 Menjelaskan makna kedaulatan rakyat 5.2 Mendeskripsikan sistem pemerintahan Indonesia dan peran lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat 5.4 Menunjukkan sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia
Kelas IX, Semester 1		
1	Menampilkan partisipasi dalam usaha pembelaan negara	1.1 Menjelaskan pentingnya usaha pembelaan negara 1.2 Mengidentifikasi bentuk-bentuk usaha pembelaan negara 1.3 Menampilkan peran serta dalam usaha pembelaan negara
2	Memahami pelaksanaan otonomi daerah	2.1 Mendeskripsikan pengertian otonomi daerah 2.2 Menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah
Kelas IX, Semester 2		
3	Memahami dampak globalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	3.1 Menjelaskan pengertian dan pentingnya globalisasi bagi Indonesia 3.2 Mendeskripsikan politik luar negeri dalam hubungan internasional di era global 3.3 Mendeskripsikan dampak globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 3.4 Menentukan sikap terhadap dampak globalisasi

4	Menampilkan prestasi diri sesuai kemampuan demi keunggulan bangsa	4.1 Menjelaskan pentingnya prestasi diri bagi keunggulan bangsa 4.2 Mengenal potensi diri untuk berprestasi sesuai kemampuan 4.3 Menampilkan peran serta dalam berbagai aktivitas untuk mewujudkan prestasi diri sesuai kemampuan demi keunggulan bangsa
---	---	--

Sumber : BSNP (2006)

3. Jenjang SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK,

Kelas X, Semester 1		
1	Memahami hakikat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	1.1 Mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya negara 1.2 Mendeskripsikan hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan 1.3 Menjelaskan pengertian, fungsi dan tujuan NKRI 1.4 Menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2	Menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional	2.1 Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional 2.2 Menganalisis peranan lembaga-lembaga peradilan. 2.3 Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku 2.4 Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia 2.5 Menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
3	Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)	3.1 Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM 3.2 Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia. 3.3 Mendeskripsikan instrumen hukum dan peradilan internasional HAM.

Kelas X, Semester 2	
4	Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi
	Menganalisis substansi konstitusi negara
	Menganalisis kedudukan pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia
	Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi negara
5	Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan
	Menganalisis persamaan kedudukan warga negara dan kewarganegaraan di Indonesia
	Menganalisis persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara.
6	Menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku
	Mendeskripsikan supra struktur dan infra struktur politik di Indonesia.
	Mendeskripsikan perbedaan sistem politik di berbagai negara.
1	Menampilkan peran serta dalam sistem politik di Indonesia
	Mendeskripsikan pengertian budaya politik
	Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia
2	Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik
	Menampilkan peran serta budaya politik partisipan
	Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi.
3	Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani.
	Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan reformasi.

3	Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	2.4	Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.
		3.1	Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
		3.2	Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan.
		3.3	Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kelas XI, Semester 2			
4	Menganalisis hubungan internasional dan organisasi internasional.	4.1	Mendeskripsikan pengertian, pentingnya, dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara
		4.2	Menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional
		4.3	Menganalisis fungsi Perwakilan Diplomatik
		4.4	Mengkaji peranan organisasi internasional (ASEAN, AA, PBB) dalam meningkatkan hubungan internasional
		4.5	Menghargai kerja sama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia
5	Menganalisis sistem hukum dan peradilan internasional.	5.1	Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan internasional.
		5.2	Menjelaskan penyebab timbulnya sengketa internasional dan cara penyelesaian oleh Mahkamah Internasional.
		5.3	Menghargai putusan Mahkamah Internasional.
Kelas XII, Semester 1			
1	Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka	1.1	Mendeskripsikan Pancasila sebagai ideologi terbuka
		1.2	Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan
		1.3	Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka.

2	Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan	2.1	Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai negara
		2.2	Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan Negara Indonesia
		2.3	Membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain
Kelas XII, Semester 2			
3	Mengevaluasi peranan pers dalam masyarakat demokrasi.	3.1	Mendesripsikan pengertian, fungsi dan peran serta perkembangan pers di Indonesia
		3.2	Menganalisis pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokratis di Indonesia
		3.3	Mengevaluasi kebebasan pers dan dampak penyalahgunaan kebebasan media massa dalam masyarakat demokratis di Indonesia
4	Mengevaluasi dampak globalisasi	4.1	Mendesripsikan proses, aspek, dan dampak globalisasi dalam kehidupan berbagai bangsa dan bernegara.
		4.2	Mengevaluasi pengaruh globalisasi terhadap kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia.
		4.3	Menentukan sikap terhadap pengaruh dan implikasi globalisasi terhadap Bangsa dan Negara Indonesia.
		4.4	Mempresentasikan tulisan tentang pengaruh globalisasi terhadap Bangsa dan Negara Indonesia.

umber : BSNP (2006)

Dalam Standar Isi (BSNP, 2006) dijelaskan pula mengenai ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan, yakni meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan.

Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat,

Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistem hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional.

3. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.

4. Kebutuhan warga negara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan warga negara.

5. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi.

6. Kekuasaan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi.

7. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.

8. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.

Di Jepang, menurut uraian Otsu (1998): Pendidikan Kewarganegaraan dalam sekolah dasar diimplementasikan sebagai "life and environmental studies" pada tingkat 1-2, dan "social studies" pada tingkat 3-6 untuk tiga jam pelajaran (1 jam pelajaran = 45 menit) per minggu. Di sekolah menengah, studi sosial terdiri atas tiga mata pelajaran, *Geografi* (4 jam per minggu pada tingkat 1 dan 2, 1 jam = 50 menit), *Sejarah* (dengan proporsi yang sama dengan geografi), dan *Kewarganegaraan* (2-3 jam per minggu pada tingkat 3).

Isi (kurikulum) Kewarganegaraan pada sekolah menengah terdiri atas:

1. *contemporary social life* (kehidupan sosial kontemporer);
2. *Improvement of national life and economy* (perbaikan kehidupan nasional dan ekonomi);
3. *democratic government and international community* (pemerintahan demokratis dan masyarakat internasional) (Otsu, 1998:54).

Pada sekolah menengah, para siswa belajar Kewarganegaraan pada tahun terakhir, pelajaran Kewarganegaraan tingkat tiga cenderung diajarkan sebagai pusat pengetahuan dan ditekankan terhadap hapalan (*memorization*), karena banyak siswa dan guru terkonsentrasi untuk ujian masuk ke tingkat sekolah menengah atas.

Kurikulum sekolah menengah atas terdiri atas bidang mata pelajaran dan sub mata pelajaran yang spesifik. Para siswa diharuskan mengambil empat kredit dari mata pelajaran Kewarganegaraan yang diri atas: *masyarakat kontemporer* (4 jam, 1 jam = 50 menit), *etika* (2 jam), dan *politik/ekonomi* (2 jam).

Isi dari kajian tentang *masyarakat kontemporer* adalah sebagai berikut:

the individual and culture in contemporary society (individu dan budaya dalam masyarakat kontemporer);

environment and human life (lingkungan dan kehidupan manusia)

contemporary politics and economy and the individual (politik dan ekonomi kontemporer dan individual);

international community and global issues (organisasi internasional dan isu-isu global) (Otsu, 1998:54).

Dalam kajian tentang *masyarakat kontemporer*, berbagai inovasi pembelajaran telah dihasilkan. Untuk mengembangkan keterampilan dan sikap pembelajaran seperti pengetahuan, beberapa guru menciptakan inovasi pembelajaran dengan mengambil isu-isu kontemporer dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif dan aktifitas yang bervariasi, seperti diskusi, games dan simulasi. Meskipun studi sosial dalam sekolah menengah atas dicitrakan sebagai pelajaran hapalan dalam waktu yang lama, namun student tentang masyarakat kontemporer telah mengubah citra (*image*) studi sosial sampai taraf tertentu. Pembelajaran kreatif pada masyarakat kontemporer dipublikasikan dan memiliki pengaruh yang mendukung guru-guru lintas bangsa.

Kajian tentang *etika* dan *politik/ekonomi* merupakan kajian penting untuk Pendidikan Kewarganegaraan. Tetapi mata pelajaran cenderung berfokus pada pengajaran tentang struktur dan metode tiap disiplin ilmu-ilmu sosial.

Sejak kajian *masyarakat kontemporer* diubah dari pelajaran wajib menjadi satu pilihan, Pendidikan Kewarganegaraan secara umum telah mengakhiri kehilangan statusnya. Hal ini berarti, pada saat yang sama Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas menjadi hal penting bagi setiap siswa yang akan menjadi pemilih dan bekerja dalam masyarakat segera setelah lulus mereka.

Iftikhar Ahmad (2004b: 43) menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan di Pakistan telah mengalami "Islamisasi" dalam aspek historis, kultural, politik, dan realitas geo-strategis bangsa. Pada 1977, Rejim Militer Zia-ul-Haq mengenalkan ideologi Islam ke dalam kurikulum nasional *social studies*. Sayangnya, selama lebih dari dua dekade berikutnya, model Islam dalam pendidikan kewarganegaraan telah menjadi bumerang dan beberapa atribut para *stakeholder* berpuncak pada kekerasan sektarian, intoleransi agama, dan militansi di pelosok negeri terhadap kurikulum nasional *social studies* (Ahmad, 2004b: 44; lihat pula Ahmed, 2001: 69-76).

Sebagai gambaran kajian *civic education* sebagai bagian dari *social studies* di Pakistan pada masa pemerintahan Zia-ul-Haq dapat dilihat pada Tabel 3.3. Jika diperlihatkan pada Tabel 3.3, tampak sekali bahwa pendidikan kewarganegaraan sarat dengan muatan ideologi (Islam) dalam arti lebih sempit, khususnya dalam konteks sejarah permusuhan Pakistan dengan India.

Sementara itu, buku-buku teks *Civics* pada 1990an dan 2000 awal nampaknya masih banyak mengacu kepada kurikulum *Social Studies* seperti dalam Tabel 3.1. Sebagai contoh, buku teks *Civics* untuk kelas IX dan X yang ditulis oleh M. Hasan Sheikh (1995 dalam Ahmad, 2004b: 44) ada perbandingan konsep "nation" menurut Barat dan konsep "Millat" atau rejim Islami dalam Islam, serta menolak *nation* dan nasionalisme. Sheikh berpendapat bahwa di Barat konsep nasionalisme berdasarkan kepada etnisitas, sedangkan *millat* berdasarkan atas ideologi Islam yang mengatasi batas-batas wilayah, ras, warna kulit, bahasa, dan budaya. Dengan demikian tidak ada tempat bagi *nation* atau nasionalisme dalam Islam, sehingga Pakistan bukanlah sebuah *nation*, tetapi sebuah *millat* (Sheikh dalam Ahmad, 2004b: 44). Dari satu contoh gambaran materi ajar *civic education* tersebut saja nampak jelas bahwa ideologi Islam yang dimaksudkan dalam pengajaran *Civics* tidak lain adalah tafsir kekuasaan (rejim) terhadap Islam untuk menjadi ideologi politik rejim. Kondisi ini tetap bertahan hingga rejim militer sekarang di bawah Jenderal Pervez Musharraf.

Bagaimana perkembangan di Cina? Pendidikan nasional Cina memiliki tujuan-tujuan untuk:

- to understand through local changes the great changes brought about in China by the reform and opening up policy and socialist market economy led by the CPC, and to understand that Marxism-Leninism, Mao Zedong Thought, Deng Xiaoping Theory and the important thought of The Three Represents are the guiding ideology in building socialism with Chinese characteristics;
 - to understand the Party's basic line on the primary stage of socialism, the country's basic economic and political system at the present stage, and the superiority of the socialist system in producing social wealth and benefiting the people;
 - to understand the objectives of building a well-off society in an all-round way and unbalanced social development so as to strengthen the mission sense of building socialist China;
 - to understand the country's achievements in science, technology and educational development, to know about the gap between China and developed countries, to understand the realistic meaning of implementing the strategy of promoting the progress of the country with science and technology;
 - to know the conditions of the population, resources and environment, to understand the policies of family planning, environmental protection, rational utilization of resources, and to establish long-lasting sustainable development; to understand that the development of such a united multiethnic country depends on all the people's solidarity, cooperation, hard work and common development, and to learn about the fine tradition of the Chinese nation and carry forward and cultivate the national spirit by one's own deeds, so as to promote socialist spiritual civilization and safeguard national steadiness and ethnic solidarity;
 - to understand the developmental trend of the contemporary world, to know the status and function of China in the world, to know the opportunities and challenges facing China, to learn survival skills, to establish global concepts, to maintain world peace;
 - to understand the common ideal for all Chinese nationalities and try to work hard in one's career and make a contribution to society (sebagaimana dikutip Zhan Wansheng dan Ning Wujie, 2004: 523).
- Sementara itu, derivasi tujuan pendidikan nasional Cina dalam kurikulum pendidikan moral adalah bertujuan untuk:
- enhance their moral dispositions;
 - help them form healthy psychological traits;
 - initiate their legal awareness;
 - strengthen their sense of social responsibility and behaviour;

Sumber: Dean (2000: 278)

Evaluation	1. Observing the keenness of the pupils about the national programme. 2. To note down the reaction of the pupils about wars with India. 3. To judge their spirits while making speeches on Jihad and Shihadat, Muslim History and culture. 4. To evaluate individuals assignment.
Methodology	1. Activity Method. 2. Narrative Method on an out-line map of Indo-Pakistan Subcontinent before independence. 3. Develop-mental Method. 4. Discussion Method. 5. Creative Method.
Activities	1. To show the Muslim majority provinces on an out-line map of Indo-Pakistan Subcontinent before independence. 2. To listen to the talks on the essential features of Muslim culture. 3. Visits to the places of historical importance. 4. To make speeches on Jihad and Shihadat. 5. To listen to special programmes and broadcasts on Muslim history and culture. 6. To participate in the congregational prayers.
Contents	1. Hindu Muslim difference in cultures. 2. Muslim Millat theory. 3. Two nation theory of independent Muslim state. 4. India's evil designs against Pakistan (The three wars with India). 5. Kashmir problem. 6. Need for the security and progress of Pakistan. 7. Jihad
Concepts	1. Ideology of Pakistan 2. Muslim Millat 3. Two nation theory 4. Struggle of independence 5. Self-sacrifice 6. Initiative 7. Jihad
Objectives	1. To understand the Hindu Muslim differences and need for Pakistan. 2. To get acquainted with the personalities who worked for the independence of Pakistan. 3. To be aware of the forces working against Pakistan. 4. To get acquainted with the freedom movement. 5. Preservation of the ideology and integrity and security of Pakistan. 6. Psycho-motor 7. To trace and fill in the map. 8. To deliver speech.

assist them in the pursuit of higher ideological and ethical standards, over and above observing the basic code of conduct;

and guide them in carrying forward the national spirit and fostering a common ideal for socialism with Chinese characteristics (dalam Zhan Wansheng dan Ning Wujie, 2004: 519)

Secarahistoris, keberadaandididikan kewarganegaraandalam untuk pendidikan moral di sekolah-sekolah Cina dapat ditelusuri pada saat pendidikan Republik Rakyat Cina 1949. Kecenderungan-cenderungankurikulum lebih mengacu pada sejarah untuk reformasi kurikulum sekarang. Materi kurikulum pendidikan moral di sekolah tidak lengkap, terlalu abstrak dan terlepas dari kehidupan sosial, serta untuk pedagoginya menekan inisiatif, kreativitas dan kompetensi siswa, serta bentuk evaluasi (penilaiannya) menekankan kepada aspek kognitif terhadap apa yang diajarkan sebagai mata pelajaran akademik (academic subject). Menanggapi kenyataan kelemahan pendidikan moral semacam itu, maka dilakukan reformasi pendidikan yang berorientasi mutu di Cina dalam pendidikan moral. Pada 1992 bentuk kurikulum Ideologi dan Politik yang diterapkan di sekolah menengah pertama hingga 2003, dengan dua revisi utama selama berakutitu untuk mengakomodasi intensifikasi proses pembaharuan-keterbukaan (*reform and opening up process*), perubahan-perubahan di masyarakat dan perbaikan-perbaikan di tingkat-tingkat kognitif siswa (Zhan Wansheng dan Ning Wujie, 2004: 512). Tujuan reformasi kurikulum tersebut adalah untuk pengembangan orientasi perasaan, sikap dan nilai; pengembangan kompetensi moral; dan, pengembangan pengetahuan moral (Zhan Wansheng dan Ning Wujie, 2004: 519-20)

Perkembangan reformasi kurikulum pendidikan moral di Cina ataralain dapat dicontohkan dalam tingkat sekolah menengah pertama antara 1977-1992 pada Tabel 3.4. Pada bagian lain, di Tabel 3.5, dapat cermati bagaimana hubungan antara tahap-tahap perkembangan sosial dan tujuan serta isi materi mata pelajaran Ideologi dan Moralitas sekolah menengah pertama.

Hasil dari reformasi kurikulum pendidikan moral salah satunya ialah berhasil dikembangkan buku-buku teks pendidikan moral mulai dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat College. Kumpulan buku teks itu, atau biasa dikenal sebagai *The Experimental Moral Education textbooks Series*, menjadi proyek nasional yang penting dari *Educational Scientific Tenth Five-year Plan*, yang dinamai dengan *Experiment-Based Research on Constructing a Whole Moral Education System to Popularize Systematic Achievements of Research and Experiment*. Buku-buku teks itu dikembangkan oleh sebuah tim *Moral Education Textbooks for College's*

yang diketuai oleh Zhan Wansheng, yang kemudian *Director of the Moral Education Centre* (sekarang *Director of the Research Department for School Education*) dari *China National Institute for Educational Research (CNIER)*. *The Experimental Moral Education Textbooks Series* terdiri atas 22 buku teks untuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan atas, sekolah kejuruan pertama dan colleges. Masing-masing-masing buku teks itu ialah:

1. *Moral Education Textbooks for Primary Schools (Grade One to Grade Six)*
2. *Moral Education Textbooks for Junior High Schools (Grade Seven to Grade Nine)*
3. *Moral Education Textbooks for Senior High Schools (Grade Ten to Grade Twelve)*
4. *Moral Education Textbooks for Secondary Vocational Schools (Grade One to Grade Three)*
5. *Moral Education Textbooks for Secondary Normal Schools (Teachers' College) (Grade One to Grade Three)* (dalam An Yunfeng, 2004: 626)

Tabel 3.4
Kurikulum Pendidikan Moral di Sekolah Menengah Pertama Cina 1977-1992

	Grade One Age 12-13	Grade Two Age 13-14	Grade Three Age 14-15
1977-79	Brief History of Social Development	Scientific Socialism	
1980-85	Youth and Adolescent Development	Brief History of Social Development	Legal Knowledge
1986-92	Citizenship Brief History of Social	Development Knowledge of Building	Socialism in China
1992	Ideology and Politics for Junior High School (Mental Health)	Ideology and Politics for Junior High School (Legal Knowledge)	Ideology and Politics for Junior High School (Brief History of Social Development and National Conditions)

Sumber: Zhan Wansheng dan Ning Wujie, 2004:513

Tabel 3.5
Hubungan antara tahap-tahap perkembangan sosial dan tujuan serta isi materi mata pelajaran Ideologi dan Moralitas di sekolah menengah pertama

	Mental Health	Morality	Law	National Conditions
Growing Self	Knowing	Self-esteem and Self-encouragement	Legal Learning and Application	Cultural Identity/ Commitment to Chinese Culture
Relations between Self and Others	Communication and Understanding	Morality in Communication	Rights and Obligations	Common Ideals
Relations between Self, Collective, State and Society	Positive Attitudes towards Social Development and Progress	Responsibility to the Motherland, Society and Natural Environment	Law and Social Order	Understand National Conditions and Love China

Sumber: PRCMOE, 2003, dalam Zhan Wansheng dan Ning Wujie, 2004: 519

Buku-buku teks bertujuan untuk mendukung reformasi kurikulum pendidikan moral sebagai penerapan praktek pendidikan moral yang baru di semua jenis sekolah. Buku-buku teks mewakili eksplorasi rintisan untuk pembaharuan (reformasi) kurikulum Ideologi dan Moralitas dan memberikan materi-materi pokok dan dasar untuk pembentukan panduan-panduan kurikulum *Ideology and Moralitas*. Panduan-panduan kurikulum yang baru itu telah dibentuk oleh Menteri Pendidikan, untuk *Moral Character and Life* (PRCMOE, 2002a) dan untuk *Moral Character and Society* (PRCMOE, 2002b) di sekolah dasar, dan untuk *Ideology and Morality* (PRCMOE, 2003) di sekolah menengah pertama, yang memuat beberapa tujuan, materi, dan metode pendidikan moral sama sebagai garis besar bahan-bahan pengajaran (An Yunfeng, 2004: 626).

The Experimental Moral Education Textbook Series didasarkan kepada sebuah elaborasi desain dan penyusunan menurut teori pendidikan moral dan materi yang berkaitan dengan praktek dan penerapannya (implementasi). Dengan demikian, menurut An Yunfeng (2004: 625-629), buku-buku teks itu memiliki ciri:

....First, the textbooks embody an approach which combines awareness, feeling, will and behaviour. ...Secondly, the textbooks embody the approach of 'back to life', by combining theory with practice. ...Thirdly, the textbooks have introduced a research-oriented study method for the students.

Secara umum kurikulum pendidikan di Hong Kong pasca 1997 antara lain meliputi pelajaran-pelajaran sebagai berikut:

- Chinese Language Education;
- English Language Education;
- Mathematics Education;
- Science Education;
- Technology Education;
- Personal, Social and Humanities Education (PSHE);
- Arts Education;
- Physical Education (Tammy Kwan, 2003: 67).

Kaitannya dengan *civic education* di lingkungan sekolah di Hong Kong pasca 1997, pemerintah setempat makin meningkatkan unsur-unsur ke-China-an dalam kurikulum sekolah, Sebagai contoh, sejarah dan budaya China dirancang sebagai unsur pokok (*core elements*) pembelajaran dengan nama baru: *Personal, Social and Humanities Education (PSHE)*. Lebih dari itu, kegiatan-kegiatan ekstra-kurikuler dikaitkan dengan budaya China seperti orkestra China, tarian China, dan kelas-kelas Kung Fu, menjadi intensif (Lee, 2006: 4). Sebagai gambaran kompetensi dasar PSHE di tiap jenjang sekolah (dasar hingga menengah atas) dijabarkan dalam Tabel 3.6. Dari tabel tersebut tampak jelas bahwa konsep nasionalisme dan moralitas (konfusianisme) dalam PSHE menjadi dasar bagi *civic education* di Hong Kong. Selain itu, PSHE ini memuat aspek-aspek kajian secara integratif bagi mata pelajaran lainnya yang menjadi etos pembelajaran sepanjang hayat (Tabel 3.7).

The strand of Social System and Citizenship with the breakdown of objectives in the three domain areas across the four key stages of education (i.e. lower and upper primary, junior and senior secondary) within Personal, Social and Humanities Education

Strand VI (stage 1)	Knowledge and understanding: 1. to identify the multiple roles of an individual in different social groups and to understand the respective rights and responsibilities one may have within the groups	Knowledge and understanding: 1. to identify the norms within the groups where an individual is engaged, and to understand the important effects these norms exert in our daily lives	Knowledge and understanding: 1. to identify the norms within the groups where an individual is engaged, and to understand the important effects these norms exert in our daily lives
Strand VI (stage 2)	2. to understand the rights and responsibilities of an individual and how they are protected by the Basic Law and the local legal system	3. to understand the functions of and services provided by the Government and local social institutions in response to needs and interests of HK residents	3. to understand the importance of social virtues, the functions of rules and regulations, and the importance of the Basic Law to the HKSAR residents
Strand VI (stage 3)	1. to understand the importance of the Basic Law and the basic principles and meanings of 'One Country, Two Systems', 'Hong Kong, People Ruling Hong Kong, and 'A High Degree of Autonomy'	4. to analyse the causes and effects of social and political issues at local, national and global levels	4. to identify the local and national symbols
Strand VI (stage 4)	1. to examine the interaction between local social and political systems	2. to analyse diversified views on rights and responsibilities in different cultural contexts	4. to identify the local and national symbols
	2. to identify the key features of social and political systems in the national and global contexts	3. to analyse diversified views on rights and responsibilities among local, national and global identities	5. to identify some community services provided by the Government
	3. to analyse diversified views on social virtues	5. to analyse and evaluate relationships among local, national and global identities	5. to appreciate the need for fair rules and be willing to observe rules and regulations
	4. to evaluate different views in different cultural contexts		6. to appreciate the need for fair rules and be willing to observe rules and regulations
	5. to analyse and evaluate relationships among local, national and global identities		7. to appreciate the need for fair rules and be willing to observe rules and regulations

Skills: 1. to distinguish between facts and opinion, between means and ends with a view to promoting a consensual view amongst diversified views, or arriving at a wise choice of alternative views based on rational judgement and sound arguments supported by ample evidence	Values and attitudes: 1. to cultivate an open mind to accept and respect different views and be willing to resolve disagreements	Values and attitudes: 1. to be willing to contribute to the collective interests of the community	Values and attitudes: 1. to exercise one's own rights, accept and fulfill one's responsibilities
Skills: 1. to research public issues/civic affairs	Values and attitudes: 1. to show respect for and uphold the rule of law	Values and attitudes: 1. to reflect on the balance between norms and personal identity	Values and attitudes: 1. to show respect for the rights of others
Skills: 1. to exercise skills	Values and attitudes: 1. to show respect for and uphold the rule of law	Values and attitudes: 1. to reflect on the balance between rights and responsibilities, and to exercise one's rights and responsibilities in various settings through different channels	Values and attitudes: 1. to show respect for the rights of others
Skills: 1. to research public issues/civic affairs	Values and attitudes: 1. to show respect for and uphold the rule of law	Values and attitudes: 1. to be willing to contribute to the collective interests of the community	Values and attitudes: 1. to show respect for the rights of others
Skills: 1. to research public issues/civic affairs	Values and attitudes: 1. to show respect for and uphold the rule of law	Values and attitudes: 1. to be willing to contribute to the collective interests of the community	Values and attitudes: 1. to show respect for the rights of others
Skills: 1. to research public issues/civic affairs	Values and attitudes: 1. to show respect for and uphold the rule of law	Values and attitudes: 1. to be willing to contribute to the collective interests of the community	Values and attitudes: 1. to show respect for the rights of others
Skills: 1. to research public issues/civic affairs	Values and attitudes: 1. to show respect for and uphold the rule of law	Values and attitudes: 1. to be willing to contribute to the collective interests of the community	Values and attitudes: 1. to show respect for the rights of others
Skills: 1. to research public issues/civic affairs	Values and attitudes: 1. to show respect for and uphold the rule of law	Values and attitudes: 1. to be willing to contribute to the collective interests of the community	Values and attitudes: 1. to show respect for the rights of others
Skills: 1. to research public issues/civic affairs	Values and attitudes: 1. to show respect for and uphold the rule of law	Values and attitudes: 1. to be willing to contribute to the collective interests of the community	Values and attitudes: 1. to show respect for the rights of others
Skills: 1. to research public issues/civic affairs	Values and attitudes: 1. to show respect for and uphold the rule of law	Values and attitudes: 1. to be willing to contribute to the collective interests of the community	Values and attitudes: 1. to show respect for the rights of others
Skills: 1. to research public issues/civic affairs	Values and attitudes: 1. to show respect for and uphold the rule of law	Values and attitudes: 1. to be willing to contribute to the collective interests of the community	Values and attitudes: 1. to show respect for the rights of others
Skills: 1. to research public issues/civic affairs	Values and attitudes: 1. to show respect for and uphold the rule of law	Values and attitudes: 1. to be willing to contribute to the collective interests of the community	Values and attitudes: 1. to show respect for the rights of others
Skills: 1. to research public issues/civic affairs	Values and attitudes: 1. to show respect for and uphold the rule of law	Values and attitudes: 1. to be willing to contribute to the collective interests of the community	Values and attitudes: 1. to show respect for the rights of others
Skills: 1. to research public issues/civic affairs	Values and attitudes: 1. to show respect for and uphold the rule of law	Values and attitudes: 1. to be willing to contribute to the collective interests of the community	Values and attitudes: 1. to show respect for the rights of others
Skills: 1. to research public issues/civic affairs	Values and attitudes: 1. to show respect for and uphold the rule of law	Values and attitudes: 1. to be willing to contribute to the collective interests of the community	Values and attitudes: 1. to show respect for the rights of others
Skills: 1. to research public issues/civic affairs	Values and attitudes: 1. to show respect for and uphold the rule of law	Values and attitudes: 1. to be willing to contribute to the collective interests of the community	Values and attitudes: 1. to show respect for the rights of others

Source: Curriculum Development Council (2000) *Learning to Learn: Personal, Social and Humanities Education (Consultation Document)*, pages 34-37 sebagaimana dikutip dalam (Tammy Kwan, 2003: 71).

Tabel 3.7
Pengembangan Konseptual PSHE Termasuk Enam Bagian Topik dan Sub Topik dalam Pembelajaran Sepanjang Hayat

Strands	Sub-strands	Perspective
Personal and Social Development	<ul style="list-style-type: none"> Self-esteem Self-management Healthy Lifestyles Human relationships Sexuality issues 	To understand people as individuals (This strand integrates content and learning outcomes across the subject areas of Personal and Social Education, Civic Education and Religious and Ethical Education).
Time, Continuity, and Change	<ul style="list-style-type: none"> Time and chronology Understanding the past Change and continuity Interpretations and perspectives 	To understand people in relation to time (This strand integrates content and learning outcomes across the subject areas of Chinese History and History).
1. Culture and Heritage	<ul style="list-style-type: none"> Foundation of culture Customs and Traditions Modernization and past modern world Cultural diversities and interaction 	To understand people in the cultural world (This strand integrates content and learning outcomes across the subject areas of Chinese History, History, Ethics and Religious Studies and Travel and Tourism).
7. Place and Environment	<ul style="list-style-type: none"> Natural and human features of a place Spatial association and interaction People - environment interrelationship Conservation and sustainable development 	To understand people in relation to space and the environment (This strand integrates content and learning outcomes across the subject areas of Geography, Environmental Education and Travel and Tourism).
Resources and Economic Activities	<ul style="list-style-type: none"> Use of resources Production and consumption People and work Exchange 	To understand people in material world (This strand integrates content and learning outcomes across the subject areas of Economic, Geography, Government and Public Affairs and Travel and Tourism).
1. Social System and Citizenship	<ul style="list-style-type: none"> Rights, Responsibilities, and Social Virtues Social norms, rule, and law Local, national, and global identities Social system, political system, and interaction 	To understand people as groups (This strand integrates content and learning outcomes across the subject areas of Civic Education, Government and Public Affairs and Ethics and Religious Studies).

umber: Curriculum Development Council (2000) *Learning to Learn: Personal, Social and Humanities Education (Consultation Document)*, page 5 (sebagaimana dikutip Tammy Kwan, 2003: 70).

Hal demikian tentu saja amat berbeda dengan isi *civic education* di Hong Kong pada masa sebelum penyerahan kedaulatan kepada RRC. Sebagai bahan perbandingan dapat diambil konten materi *civic education* dalam buku-buku teks mata pelajaran EPA seperti tampak pada Tabel 3.8. Pada pelajaran EPA, konten *civic education* lebih banyak memuat aspek pengetahuan sistem politik liberal dan ekonomi kapitalis. Kendatipun ada topik mengenai Hong Kong, tetapi tidak menyentuh persoalan identitas nasional Hong Kong sebagai bagian nasionalisme China.

Tabel 3.8
Konten Kajian Civic Education pada Pelajaran EPA

No	Topik "Civic Education" dalam Buku Teks EPA
1	<p>Hong Kong political system</p> <ol style="list-style-type: none"> Hong Kong as an entity: colony, history, areas, climate/ relief, economy and population, growth, people, etc. Constitution, i.e. Basic Law, the Sino-British Joint Declaration, Hong Kong in transition Political development and future of Hong Kong, history, institutions, structure, composition, functions of central and local governments, the judiciary, District Board and elections, etc. Social institutions and political ideologies, political parties, political theories, principles and concepts such as rule of law, democracy, freedom of the press, mass media, advertising and consumer education, definition and importance of government, cosmopolitanism, etc.
2	<p>Political output</p> <ol style="list-style-type: none"> Administrative objectives and policy-making process Law and order, legal system, e.g. the judiciary, police force, ICAC, Correctional Service Department, law and order, etc. Government's role in economy, intervention, taxation, defence and foreign policy, foreign affairs, trade promotion, etc Social services provided by the government, e.g. census, education, vocational training, social welfare, housing, labour, medical and health services, measures against social evils, etc. Services provided by Consumer Council, voluntary agencies, etc.
3	<p>Political input</p> <ol style="list-style-type: none"> Government and people: channels of communication, advisory institutions, etc. Election and participation in community affairs: election process, meaning of election, etc.
4	<p>Self as political actor</p> <ol style="list-style-type: none"> Status: identity of citizen, my role as a citizen Rights of citizen Political, social and personal obligations of citizen

Others

1. Hong Kong and the outer world: transportation, communication, economic linkage, place in the world, as an international trade and finance centre, international relations and organisations, tourism
2. Public utilities, food, water and power supply, etc.
3. Social and economic issues and problems, their prevention and remedies: pollution and
4. conservation, smoking, alcoholism, diseases, juvenile delinquency, drug abuse, education, social welfare, housing, public health, industrial problems, AIDS, transportation and communication, etc.
5. Production, division of labour, visible and invisible trade, types of industry, financial services, sales methods, etc.
6. Living skills/knowledge: leisure, hobbies, safety measures, road safety, advertising and consumer protection, etc.
7. Methodology of social science, critical thinking, judgement, problem-solving, decision-making, choice

Sumber: Thomas Kwan-Choi Tse (2000: 100-101).

E. Bagaimana Kultur Kelas Civic Education?

Sejak Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diimplementasikan di Indonesia pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan (persekolahan maupun perguruan tinggi), subjek pembelajaran tersebut menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan. Kendala dan keterbatasan tersebut adalah: (1) masukan instrumental (*instrumental input*) terutama yang berkaitan dengan kualitas guru/dosen serta keterbatasan fasilitas dan sumber belajar, dan (2) masukan lingkungan (*environmental input*) terutama yang berkaitan dengan kondisi dan situasi kehidupan politik negara yang kurang demokratis. Dengan demikian, pelaksanaan PKn tidak mengarah pada misi sebagaimana seharusnya. Beberapa indikasi empirik yang menunjukkan salah arah tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, proses pembelajaran dan penilaian dalam PKn lebih menekankan pada dampak instruksional (*instructional effects*) yang terbatas pada penguasaan materi (*content mastery*) atau dengan kata lain hanya menekankan pada dimensi kognitifnya saja. Sedangkan pengembangan dimensi-dimensi lainnya (afektif dan psikomotorik) dan pemerolehan dampak pengiring (*nurturant effects*) sebagai "*hidden curriculum*" belum mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Kedua, pengelolaan kelas belum mampu menciptakan suasana kondusif dan produktif untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa/mahasiswa melalui perlibatannya secara proaktif dan interaktif baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas (intra dan ekstra kurikuler) sehingga berakibat pada miskinnya pengalaman

belajar yang bermakna (*meaningful learning*) untuk mengembangkan kehidupan dan perilaku siswa/mahasiswa. *Ketiga*, pelaksanaan kegiatan ekstra-kurikuler sebagai wahana sisio-pedagogis untuk mendapatkan "*hands-on experience*" juga belum memberikan kontribusi yang signifikan untuk menyeimbangkan antara penguasaan teori dan praktek pembiasaan perilaku dan keterampilan dalam berkehidupan yang demokratis dan sadar hukum.

Indikasi-indikasi tersebut melukiskan begitu banyaknya kendala kurikulum dan sosial-kultural bagi PKn untuk menghasilkan suatu totalitas hasil belajar yang mencerminkan pencapaian secara komprehensif (menyeluruh) dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang koheren dan konfluen. Hasil belajar PKn yang belum mencapai keseluruhan dimensi secara optimal seperti digagaskan itu berarti menunjukkan bahwa tujuan kurikulum PKn belum dapat dicapai sepenuhnya.

Menyadari hal tersebut di atas, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah, khususnya Departemen Pendidikan Nasional antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kualitas kemampuan mengajar guru dan dosen PKn. Namun pelatihan tersebut masih perlu terus ditingkatkan kualitasnya agar mampu menunjukkan hasil yang optimal;
 - 2) Penataan kembali materi PKn agar lebih sesuai dengan tuntutan kebutuhan bagi kehidupan masyarakat yang demokratis. Namun, upaya penataan tersebut dirasakan belum menghasilkan perubahan yang signifikan dalam pembelajaran PKn seperti yang diharapkan;
 - 3) Perubahan sistem belajar di persekolahan, dari catur wulan ke semester, dan di perguruan tinggi menjadi sistem kredit semester (SKS), yang diyakini akan lebih memungkinkan guru/dosen untuk dapat merancang alokasi waktu dan strategi pembelajaran secara fleksibel dalam rangka upaya peningkatan kualitas pembelajarannya, belum memperlihatkan hasil yang memadai.
- Selain menghadapi kendala internal sebagaimana diuraikan di atas, PKn juga menghadapi kendala eksternal yaitu kritikan dan tuntutan dari berbagai lapisan masyarakat berkaitan dengan semangat demokratisasi yang semakin meningkat dengan segala eksensya. PKn yang secara paradigmatik sarat dengan muatan afektif namun dilaksanakan secara kognitif telah disikapi secara keliru sebagai satu-satunya obat mujarab (*panacea*) untuk mengatasi persoalan kehidupan para siswa khususnya yang menyangkut perilaku dan moral. Namun demikian, kritikan dan tuntutan tersebut sudah seharusnya direspons

dan diakomodasikan secara proporsional karena memang pendidikan secara umum dan PKn secara khusus bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Tanggung jawab bersama untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas pada hakikatnya merupakan perwujudan dari amanat nasional.

Kendala eksternal lainnya yaitu pendidikan di Indonesia menghadapi pada berbagai persoalan dan situasi global yang berkembang cepat setiap waktu baik yang bermuatan positif maupun yang bermuatan negatif atau bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ketidakmampuan bangsa Indonesia dalam merancang program pendidikan yang mengakomodasikan kecenderungan dan persoalan global tersebut berarti akan menghilangkan kesempatan untuk mengejar ketertinggalan untuk secara bertahap dapat mensejahtarkan dirinya dengan bangsa-bangsa yang sudah maju dalam bidang pendidikannya.

Di lain pihak terdapat pula beberapa permasalahan kurikulum yang mendasar dan menjadi penghambat dalam peningkatan kualitas PKn adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan alokasi waktu yang tercantum dalam Struktur Kurikulum Pendidikan dijabarkan secara kaku dan konvensional sebagai jam pelajaran tatap muka terjadwal sehingga kegiatan pembelajaran PKn dengan cara tatap muka di kelas menjadi sangat dominan. Hal itu mengakibatkan guru atau dosen tidak dapat berimprovisasi secara kreatif untuk melakukan aktivitas lainnya selain dari pembelajaran rutin tatap muka yang terjadwal dengan ketat.
2. Pelaksanaan pembelajaran PKn yang lebih didominasi oleh kegiatan peningkatan dimensi kognitif mengakibatkan porsi peningkatan dimensi lainnya menjadi terbengkalai. Di samping itu, pelaksanaan pembelajaran diperparah lagi dengan keterbatasan fasilitas media pembelajaran.
3. Pembelajaran yang terlalu menekankan pada dimensi kognitif itu berimplikasi pada penilaian yang juga menekankan pada penguasaan kemampuan kognitif saja sehingga mengakibatkan guru/dosen harus selalu mengejar target pencapaian materi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas perlu dilakukan pengkajian secara menyeluruh terhadap masalah-masalah mendasar sehingga PKn dapat diberdayakan menjadi "subjek pembelajaran yang kuat" (*powerful learning area*) yang secara kurikulum ditandai oleh pengalaman belajar secara kontekstual dengan ciri-ciri: bermakna (*meaningful*), terintegrasi (*integrated*), berbasis nilai (*value-based*), menantang (*challenging*), dan

mengaktifkan (*activating*). Melalui pengalaman belajar semacam itulah para siswa difasilitasi untuk dapat membangun pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang demokratis dalam koridor psiko-pedagogis-konstruktif.

Bagaimana dengan pengalaman Pakistan? Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dominannya pengaruh pemerintahan militer di Pakistan pada gilirannya berdampak kuat pada kurikulum dan bahan ajar *civic education* di sekolah-sekolah Pakistan. Islam telah ditafsirkan sedemikian rupa oleh rejim untuk mempertahankan *status quo*, khususnya melalui lembaga-lembaga pendidikan. Ahmad (2004) dan Dean (2000: 240-241) mencatat bahwa militer yang kuat, sistem feodal, Muslim ekstrimis (fundamentalis) telah mempengaruhi kultur Pakistan.

Kekuatan-kekuatan kultur di Pakistan itu pada gilirannya turut mempengaruhi kultur kelas *civic education* di sekolah-sekolah. Sistem pendidikan yang saling bersitegang di Pakistan antara model *indigenous learning*, pendidikan madrasah, dan tradisi kolonial. Model *indigenous learning* yang dikembangkan oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat cenderung masih menggunakan pendekatan "Pavlopien", yaitu menggunakan rasa cemas sebagai pengkondisian untuk tanggapan yang diharapkan dari para siswa. Model pendidikan Madrasah cenderung menggunakan pendekatan bank, di mana pembelajaran lebih banyak menyimpan dan menghafal informasi-informasi (ajaran-ajaran agama Islam) yang diberikan guru di kelas. Model tardisi kolonial, tidak kalah buruknya dengan dua model lainnya, di mana proses pengajaran yang dilakukan guru hanyalah merupakan proses transmisi dan pembelajaran sebagai memorisasi pengetahuan. Guru hanya membacakan satu bab dari buku teks dan memberikan siswa pertanyaan untuk dijawab (Dean, 2000: 242-243).

Dengan gambaran tersebut di atas, maka dapat dibayangkan bahwa proses pembelajaran *civic education* di kelas mengalami kultur serupa. Hal ini merupakan akibat dari sistem pendidikan yang dihegemoni oleh rejim tentara yang otoritarian, sehingga amat tidak kondusif terhadap idealitas pembentukan kultur belajar yang emansipatif, kritis dan partisipatoris dari siswa sebagai warga negara muda.

Apakah Cina memiliki pengalaman lain? Dari paparan sebelumnya dapat diperoleh gambaran bagaimana sebenarnya *civic education* di Cina, yang tidak lain merupakan bagian dari pendidikan moral. Dengan demikian, jelas terbayang bagaimana karakteristik *civic education* di Cina yang sarat dengan visi ideologi politik Partai Komunis Cina, yakni Marxisme-Leninisme, Ajaran Mao Zedong dan teori Deng Xiaoping.

Menurut Zhu Xiaoman dan Liu Cilin (2004) secara umum ada dua pendekatan pengajaran moral di sekolah-sekolah Cina. Pertama, pendekatan pengajaran dengan berbasis mata pelajaran (*Subject-based moral education*). Pendekatan ini menjadi mata pelajaran Pendidikan Moral tersendiri, di mana guru-guru khusus mengajar tentang ideologi, politik, hukum, moralitas dan kesehatan mental, sebagaimana kurikulum mata pelajaran lainnya (seperti Bahasa Cina, Bahasa Inggris, Matematika, Sejarah dan seterusnya).

Kedua, pendekatan pengajaran melalui kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler *Extra-curricular activities*. Kegiatan ekstra-kurikuler ini dilakukan dalam bentuk seperti *morning meeting*, *class meeting*, atau kegiatan-kegiatan Partai, *Youth League* (Liga Pemuda, semacam KNPI di Indonesia) dan *Young Pioneers* (Pemuda Pelopor). Kegiatan ekstrakurikuler ini direncanakan, dirancang, dikoordinasikan dan diawasi oleh organisasi-organisasi di bawah Partai Komunis Cina, *Youth League* (Liga Pemuda) dan *Young Pioneers* (Pemuda Pelopor) sama seperti, *as well as the Office of Moral Education* dan guru-guru kelas (Xiaoman dan Cilin, 2004:481-494).

Dapat dimengerti jika baik dalam pendekatan pertama maupun pendekatan kedua, model pendidikan yang dikembangkan bersifat indoktrinatif dan sarat ideologi partai penguasa. Sikap-sikap kritis sangat tertutup untuk dikembangkan dalam pendidikan kewarganegaraan di bawah sistem politik otoriter. Namun, dari kedua pendekatan itu, ada situs-situs kewarganegaraan yang dapat menjadi media warga negara untuk mengaktualisasikan dirinya yakni melalui Partai dan organisasi kepemudaan partai. Organisasi-organisasi ini nampak berperanan penting dalam membangun kultur politik dari model pendidikan moral yang memuat aspek aspek *citizenship education*. Sayangnya sekali, penulis belum memperoleh informasi bagaimana model-model pendidikan yang dilakukan oleh Partai maupun organisasi kepemudaannya. Namun, dari pengalaman pengamatan di Indonesia, partai dan organisasi kepemudaan memiliki bentuk-bentuk perkaderan (*training* atau sejenisnya) yang khas untuk selain membangun keangsaan hidup lembaga, juga melakukan rekrutmen dan regenerasi.

Dari paparan di muka, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di masing-masing negara memiliki berbagai penamaan yang berbeda-beda dan aspek penekanan yang berbeda pula, sebagai ciri dan karakteristik yang dipengaruhi oleh sistem nilai dan budaya politik (sistem politik) yang dianut suatu negara. Dalam kasus Cina, pendidikan moral menjadi mata pelajaran penting untuk implementasi *civic education* di sekolah.

Aspek politik sangat dominan mempengaruhi model *civic education* di Cina. Hal ini merupakan sebuah keniscayaan dari sistem politik otoriter Cina di bawah pemerintahan Partai Komunis Cina yang mengedepankan kepatuhan warga negaranya untuk mengუსung cita-cita partai tersebut, semenjak berkuasa 1949 hingga sekarang. Hal menarik ialah bahwa meskipun *civic education* sebagai bagian dari pendidikan moral diajarkan secara formal di sekolah, partai dan organisasi kepemudaannya telah berhasil membangun situs-situs kewarganegaraan yang masif.

Sekilas, keberadaan *civic education* di Cina hampir memiliki persamaan-persamaan dengan kondisi yang ada di Indonesia, terutama pada masa Orde Baru (lihat disertasi Freddy Kiran Kalidjermih, 2005). Jika di masa Orde Baru, *civic education* identik dengan pendidikan moral yang dijabarkan dari tafsir rejim atas Pancasila sebagai ideologi negara, maka di Cina selain menanamkan *status quo* pemerintah juga menanamkan ideologi Marxisme-Leninisme, Ajaran Mao Zedong dan Teori Deng Xiaoping.

Bagaimana kultur kelas *civic education* di Hong Kong? Depolitisasi dalam pembelajaran *civic education* di Hong Kong pada masa kolonial Inggris tampak masih terasa kuat selama transisi pasca penyerahan kedaulatan tahun 1997. Pada periode kolonial, pembelajaran *civic education* menghindari perbincangan topik politik, sehingga *civic education* steril dari kajian hal demikian. Siswa lebih bersifat pasif, dituntut taat dan patuh. Selama periode kolonial Inggris, *civic education* di Hong Kong tak pernah mendapat tempat penting di kurikulum sekolah Hong Kong. Meskipun pada 1950 pemerintah colonial secara formal telah mengenalkan "Civics" ke dalam kurikulum sekolah menengah sebagai sebuah mata pelajaran untuk ujian terbuka. Kemudian pada 1965 ia diubah menjadi "Economic and Public Affairs" (EPA), yang lebih menekankan aspek lokal dan ekonomi. Namun, silabus mata pelajaran baru itu lebih menekankan bahwa dalam koloni Hong Kong kewajiban warga negara ialah untuk mematuhi hukum dan taat kepada pemerintah. Politik masih menjadi bahan yang sangat sensitive (peka) ketika itu. Guru diminta tidak membawa nilai-nilai politik dalam diskusi-diskusi dengan para siswa. *Section 98 of Education Regulation 1971* melarang para siswa untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan politik, dan mencegah sekolah-sekolah dari penyelenggaraan program politik (Shui, 1997: 89).

Ada beberapa alasan mengapa *civic education* tidak efektif di Hong Kong. Satu alasan menyebutkan bahwa politik masih menjadi sesuatu yang sensitif di sekolah-sekolah Hong Kong. Ini nampak pada

Guidelines on Civic Education yang bersifat ambigu dalam sikapnya terhadap pendidikan politik (Shui, 1997: 91).

Dari penelitian Lee Wing On (1999: 335) terhadap situasi kelas pembelajaran *civic education* di Hong Kong pasca penyerahan kedaulatan (1997) ditemukan bahwa kepala sekolah dan guru-guru memandang perlu untuk diskusi-diskusi terbuka dan pengembangan pemikiran kritis dan analitis di antara para siswa. Pada saat yang sama mereka juga mengeluhkan siswa-siswanya yang tidak aktif di kelas, dan tidak tertarik dengan topik-topik *civic education*. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa ujian-ujian di kelas mereka difokuskan kepada *memorizing* materi-materi buku-buku teks, dengan sedikit atau kurang menekankan kepada publik terhadap sekolah-sekolah untuk Lainnya, tekanan datang dari publik terhadap sekolah-sekolah untuk mengajar ekonomi, sejarah, dan geografi daripada *social studies*. Ini dapat dipahami karena baik guru maupun siswa tidak memberi perhatian banyak kepada *civic education*.

F. Ringkasan

1. Di **Indonesia**, Pendidikan kewarganegaraan dalam pengertian sebagai *citizenship education*, secara substantif dan pedagogis didesain untuk mengembangkan warga negara yang cerdas dan baik untuk seluruh jalur dan jenjang pendidikan. Sampai saat ini bidang itu sudah menjadi bagian inheren dari instrumentasi serta praksis pendidikan nasional dalam lima status, yakni (1) sebagai mata pelajaran di sekolah, (2) sebagai mata kuliah di perguruan tinggi, (3) sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka program pendidikan guru, dan (4) sebagai program pendidikan politik yang dikemas dalam bentuk Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Penataran P4) atau sejenisnya yang pernah dikelola oleh Pemerintah sebagai suatu *crash program*., dan (5) sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individual dan kelompok pakar terkait, yang dikembangkan sebagai landasan dan kerangka berpikir mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam status pertama, kedua, ketiga, dan keempat.
2. Di **Indonesia** kerangka sistemik PKn dibangun atas dasar paradigma bahwa PKn secara kurikulum dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab; secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat *konfluen*

atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara; secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengungkap nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Di **Jepang**, Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan mempersiapkan setiap individu untuk dapat terlibat dalam secara aktif dalam masyarakat, dan menggunakan budaya umum dalam setiap hal. Penekanan Pendidikan Kewarganegaraan. telah diubah dari mengutamakan pengetahuan umum tentang bangsa Jepang kepada kemampuan itu untuk membangun masyarakat. Pendidikan Kewarganegaraan (*civics*) dalam sekolah tingkat atas, sebagai "kewarganegaraan (*civics*)" dalam sekolah tingkat atas, dan sebagai "studi sosial" dalam sekolah tingkat menengah.
4. **Pakistan** mengakui peran penting *civic education* dalam pembentukan warga negara yang patriotik. Secara paradoksal, sebagaimana kurikulum *civic education* di sekolah-sekolah pemerintah yang menekankan pembentukan sebuah identitas warga negara Muslim, ia juga telah menghindari transmisi nilai-nilai universal demokrasi seperti kebebasan individu, kesetaraan jender, pemikiran kritis, dan menghormati keragaman agama dan kultural. Feodalisme di Pakistan menjadi salah satu faktor yang menghalangi transmisi nilai-nilai demokrasi dalam kurikulum *civic education* sehingga menjadikannya tatanan sosial feodal. Kurikulum pendidikan kewarganegaraan telah menjadi arena persaingan antar kelompok teokratis dan demokrat-liberal. Baru-baru ini diluncurkan agenda reformasi sosial liberal, yang disebut "pencerahan jalan tengah" (*enlightened moderation*) yang mencari citra Islam yang lebih damai dan lebih lembut, baik di dalam maupun di luar Pakistan. Fokus utama usulan agenda pembaharuan (reformasi) ialah pendidikan kewarganegaraan.
5. Di **Cina** tidak ada sebutan khusus "pendidikan kewarganegaraan" (*civic education*). Pendidikan kewarganegaraan khas Cina terletak secara melekat (*inherent*) dalam bentuk pendidikan moral. Pendidikan moral selalu berkaitan erat dengan politik di Cina. Secara etimologis di Cina pendidikan moral menjadi sesuatu yang esensial sebagai alat sosialisasi politik, dalam mentransmisikan nilai-nilai ideologi dan politik, tidak hanya kepada para siswa, tetapi juga untuk masyarakat luas.

6. Di Hong Kong *Civic education* diajarkan di sekolah-sekolah sejak pertama ditawarkan pada 1950. Pada 1952, kajian *civics* bersama-sama geografi dan sejarah membentuk mata pelajaran baru yang disebut *social studies* di dalam kurikulum sekolah dasar. *Civics* diajarkan sebagai mata pelajaran tersendiri di sekolah menengah pertama hingga kemudian diganti oleh mata pelajaran *economic and public affairs* (EPA) pada 1965. Selanjutnya pada 1980an silabus EPA direvisi dengan tekanan pada "individual and society" dan "enhancement of political awareness". Pada 1972 di dalam *social studies* dikenalkan kajian *government* di tingkat sekolah menengah pertama, yang membahas topik hubungan antara individu dan masyarakat sama halnya dengan peran warga Negara di tingkat masyarakat lokal dan internasional. *Social studies* kemudian diperluas untuk tingkat sekolah menengah atas pada tahun 1984.

mata pelajaran seperti *civics*, *Pakistan studies*, dan *global studies*. Di Cina pengembangan pendidikan moral didasarkan pada dokumen-dokumen PKC dan pemerintah. Di Hong Kong perkembangan *civic education* seiring konteks politik yang berkembang.

G. Lathian

1. Bila menganalisis perkembangan *civic education* di Indonesia dengan cermat, ternyata baik istilah yang dipakai, isi yang dipilih dan diorganisasikan, dan strategi pembelajaran yang digunakan untuk mata pelajaran *Civics* atau PKn atau PMP atau PPKn yang berkembang secara fluktuatif hampir empat dasawarsa (1962-1998) itu, menunjukkan indikator telah terjadinya ketidakterjadian kerangka berpikir, yang sekaligus mencerminkan telah terjadinya **krisis konseptual**, yang berdampak pada terjadinya krisis operasional kurikulum. Diskusikanlah mengapa hal demikian terjadi. Bagaimana hal itu ditanggulangi oleh kebijakan baru dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang **Sistem Pendidikan Nasional**, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang **Standar Nasional Pendidikan** dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang **Standar Isi**.

2. Konteks kelahiran Pendidikan Kewarganegaraan di Jepang dapat ditelusuri, terutama setelah Perang Dunia Kedua (1945). Pada masa itu, perhatian pemerintah Jepang terhadap pendidikan mulai menunjukkan peningkatan. Pendidikan menjadi pusat perhatian pemerintah sebagaimana direncanakan sejak periode Meiji (abad ke-19) Periode setelah kekalahan Jepang ini, merupakan titik balik yang sangat penting bagi pendidikan di Jepang. Pendidikan Jepang mengubah orientasinya dari yang bersifat militer ke arah pendekatan yang lebih demokratis. Demikian pula perubahan dirasakan dalam Pendidikan Kewarganegaraan, mata pelajaran ini telah bergeser penekanannya dari pendidikan untuk para warganegara dan pengajaran disiplin ilmu-ilmu sosial yang terkait dengan upaya untuk membangun bangsa Jepang, ke arah Pendidikan Kewarganegaraan untuk semua warganegara. Dari keterangan tersebut adakah kontribusi pendidikan bagi kebangkitan kembali bangsa Jepang dari kekalahan perang? Bagaimana kontribusi Pendidikan Kewarganegaraan sendiri dalam kaitan lahirnya kembali bangsa Jepang sebagai bangsa yang maju dan beradab dalam percaturan internasional?

3. Sebagai sebuah negara pascakolonial, Pakistan mengakui peran penting *civic education* dalam pembentukan warga negara yang

7. Di luar negara-negara tersebut di atas diperoleh informasi adanya berbagai upaya perintisan "citizenship education". Di **Uganda** "citizenship education" dan "political education" diajarkan di sekolah menengah. Sementara di sekolah dasar unsur "citizenship education" dan "political education" diintegrasikan ke dalam "social studies". Secara keseluruhan untuk mendukung pembelajaran tersebut dikembangkan "national guidelines" sebagai pedoman pelaksanaan di sekolah. Sementara itu di **Afrika Selatan** "citizenship education" secara khusus diajarkan dalam mata pelajaran "Life Orientation" dan secara terintegrasi diajarkan dalam mata pelajaran "Human and Social Science" (HSS), Language and Communication, dan Economic and Management". Semua mata pelajaran tersebut diajarkan di semua tingkatan.

8. Landasan dikembangkannya PKn di Indonesia adalah idealisme pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadikan manusia sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab secara filosofis, sosio-politis dan psikopedagogis. Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 37 ayat (1) UUSPN secara khusus ditegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dalam konteks itu pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya merupakan pendidikan kebangsaan atau pendidikan karakter bangsa. Di Jepang landasan Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Jepang tidak dapat dilepaskan dari konsep warganegara (*komin, citizen*) dan kewarganegaraan (*citizenship*). Di Pakistan pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah berada pada mata pelajaran-

patriotik. Secara paradoksal, sebagaimana kurikulum *civic education* di sekolah-sekolah pemerintah yang menekankan pembentukan sebuah identitas warga negara Muslim, ia juga telah menghindari transmisi nilai-nilai universal demokrasi seperti kebebasan individu, kesetaraan jender, pemikiran kritis, dan menghormati keragaman agama dan kultural. Dengan kegagalan untuk mengakui manfaat dan keunggulan prinsip-prinsip dasar model demokrasi liberal dari *civic education*, maka Pakistan menderita kehilangan yang tak dapat diperbaiki: Pakistan terbagi menjadi dua negara, kehilangan persatuan nasional dan menyurutkan masa lampau. Lakukan analisis komparatif pengalaman Pakistan tersebut dengan pengalaman Indonesia yang melakukan transmisi nilai-nilai universal demokrasi dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Akankah Indonesia menjadi lebih baik dibandingkan Pakistan dalam membangun karakter bangsanya dan keutuhan negaranya-bangsanya?

4. Di Cina tidak ada sebutan khusus "pendidikan kewarganegaraan" (*civic education*). Pendidikan kewarganegaraan khas Cina terletak secara melekat (*inherent*) dalam bentuk pendidikan moral. Pendidikan moral selalu berkaitan erat dengan politik di Cina. Istilah "pendidikan moral" (*daode jiaoyu*) disebut juga pendidikan politik (*sixiang jiaoyu*) atau pendidikan politik (*zhengzhi jiaoyu*) dan atau pendidikan ideopolitik, sehingga kualitas moral bagi dua sisi mata uang yaitu sama kualitasnya dengan kualitas ideomoral dan atau moral-ideopolitik (*sixiang zhengzhi suzhi*). Tiga istilah tersebut digunakan secara bertukaran dalam literatur pendidikan di Cina. Kemukakan bukti-bukti bagaimana dampak pelaksanaan Pendidikan kewarganegaraan khas Cina tersebut bagi kejayaan bangsa dan anegara mereka? Lakukan analisis komparatif dengan pengalaman Indonesia pada saat menggunakan **Pendidikan Moral Pancasila** (PMP) sebagai terminologi Pendidikan Kewarganegaraan pada masa Orde Baru tentang kekuatan dan kelemahannya masing-masing?

5. Sebagai bekas "negara kota" jajahan Inggris, Hong Kong mengalami satu pergeseran identitas politik dari wilayah koloni menjadi kesatuan wilayah berdaulat di bawah pemerintah China Daratan (Republik Rakyat China, RRC). Hal ini membawa akibat pada status Hong Kong sebagai daerah pemerintah khusus di dalam negara RRC yang dikenal sebagai "One Country, Two Systems." Kedua, perubahan identitas politik tadi mempengaruhi sistem politik yang pada masa kolonial Inggris, Hong Kong begitu kuat ditanamkan arti penting prinsip-prinsip pemerintahan demokrasi

liberal model Inggris. Namun, setelah penyerahan kedaulatan Hong Kong kepada RRC, maka berdampak pada proses politik yang mengikuti budaya politik China yang dominan dipengaruhi Konfusianisme. Bagaimana pengaruh perubahan politik Hong Kong pasca 1997 terhadap pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) di sekolah-sekolah Hong Kong?

B. Kajian Lanjut

1. Kaji lebih jauh bagaimana merancang program PKn agar menjadi subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengunsung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi tuntunan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.
2. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diberikan selama 2 jam pelajaran per minggu itu bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: (a) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; (b) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi; (c) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; (d) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kaji lebih jauh bagaimana strategi pembelajaran dirancang agar tujuan PKn tersebut dapat dicapai secara efektif.
3. Berdasarkan kebijakan baru bahwa kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) tersebut harus mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan. Kaji lebih jauh bagaimana strategi pengembangan KTSP yang dapat mengembangkan keunggulan lokal dan kompetitif secara nasional.
4. Kaji lebih jauh bagaimana kekuatan konten kajian *Civic Education* pada Pelajaran EPA di Hong Kong dan aspek-aspek Pendidikan Kewarganegaraan kita seperti yang tercantum dalam Standar isi Tahun 2006. Temukan kekuatan dan kelemahan masing-masing.

TENTANG EDITOR



Udin S. Winataputra adalah Guru Besar pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Terbuka (UT) dan dosen luar biasa Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Jabatan sekarang adalah Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Bidang keahlian adalah Kurikulum dan Pembelajaran dengan *pedagogik-subjek* Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kewarganegaraan.



Dasim Budimansyah adalah Guru Besar pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Universitas Pendidikan Indonesia. Jabatan sekarang adalah Ketua Program Studi Pendidikan Umum/Nilai Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Bidang keahlian adalah Sosiologi dan Kewarganegaraan dengan *pedagogik-subjek* Sosiologi Kewarganegaraan (*Sociology of Citizenship*) dan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Buku ini mengkaji lebih dalam bagaimana perkembangan *civic education* atau *citizenship education* atau pendidikan kewarganegaraan di berbagai negara. Untuk itu penulis mengorganisasikan pembahasannya terpusat pada pertanyaan-pertanyaan: Bagaimana konteks lahirnya *civic education* atau *citizenship education*?; Apa yang menjadi landasan pengembangannya?; Bagaimana kerangka sistemiknya?; Bagaimana profil kurikulum dan bahan belajarnya?; dan Bagaimana kultur kelasnya? Sementara itu negara-negara yang menjadi situs nasional *civic education* atau *citizenship education* akan dikelompokkan kedalam: (1) Kawasan Eropa, Amerika, dan Australia; dan (2) Kawasan Asia dan Afrika.

Dari hasil kajian deskriptif-analitik tentang *civic education* atau *citizenship education* pada semua kawasan tersebut, akan dikemukakan: Persamaan karakteristik *civic education* secara universal; Keunikan profil *civic education* pada masing-masing negara; Strategi umum pengembangan kurikulum dan pembelajaran *civic education* di berbagai negara; Analisis teoretik dan empirik berbagai konsepsi pengembangan kurikulum dan pembelajaran *civic education* yang diterapkan dalam konteks sistem pendidikan di berbagai negara; Keunggulan dan kelemahan setiap konsepsi pengembangan kurikulum dan pembelajaran *civic education* dalam konteks sistem pendidikan negara berkembang; dan Model adaptif kurikulum dan pembelajaran *civic education* untuk negara berkembang dalam perspektif kebutuhan pengembangan pendidikan kewarganegaraan.

Widya Aksara Press

Jl. Sariwangi Indah I No. 4

Bandung 40559

Telp. (022) 2019800

E-mail : widsara@yahoo.co.id

ISBN 978-602-99677-2-2



9 786029 967722 >